



# **PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA**

**(Dilengkapi 45 Sifat Karakter Bangsa)  
Dalam Bentuk Tanya - Jawab**



**KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2017**







# PANCASILA



**KETUHANAN YANG MAHA ESA**



**KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB**



**PERSATUAN INDONESIA**



**KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH  
HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM  
PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN**



**Keadilan Sosial Bagi Seluruh  
Rakyat Indonesia**



## **UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

### **PEMBUKAAN**

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KATA SAMBUTAN**



Pertama-tama saya sebagai pribadi maupun selaku Menko Polhukam RI ingin mengucapkan rasa gembira saya atas cetak-ulang sekaligus penyempurnaan buku dengan judul *Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa* yang disusun oleh sdr. Arief Poerboyo Moekiyat yang pada saat ini menjabat sebagai Deputy VI/Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa–Kemenko Polhukam RI. Saya ingin pula mengucapkan selamat kepada penulis karena disela-sela pekerjaan rutinnnya yang sangat padat, ia tetap mampu menyisihkan waktu untuk menulis sebuah buku yang berharga.

Kita semua mengetahui bahwa dunia terus-menerus berubah, dan di era teknologi informasi masa kini, perubahan tersebut menjadi sangat cepat serta dinamika yang terjadi akibat perubahan sangat cepat itu sulit ditebak hasilnya. Kita di Indonesia tidak lepas dari perubahan tersebut yang lebih tepat kalau disebut sebagai proses transformasi karena menyangkut perubahan sendi-sendi yang paling hakikat dari bangsa kita. Transformasi adalah bagian dari kehidupan manusia dan terjadi terus-menerus dan terjadi di berbagai tahap kehidupan, baik sebagai individu atau bagian dari masyarakat.

Sering transformasi didefinisikan sebagai pengalaman yang selalu berlangsung (*on-going process*) mirip gerakan siklus yang dimulai dengan pertemuan yang menyebabkan terjadinya rasa tidak nyaman, terkadang ada ketegangan serta gangguan dan dari itu sering muncul dalam diri kita berbagai pertanyaan lalu diikuti oleh refleksi diri tentang pengalaman hidup yang dilaluinya. Karena itulah para pakar sering pula menyatakan bahwa transformasi adalah sebuah proses perubahan yang berjangka panjang (*far-reaching changes*) yang berdampak pada format atau bentuk institusi tersebut.

Pada sisi lain, kita sadar bahwa sebagai sebuah bangsa yang besar yang terdiri dari berbagai suku, bermacam adat-istiadat, beragam budaya lokal serta agama-agama dan kepercayaan kita selalu menghadapi tantangan yang multi-kompleks karena memang merupakan sebuah berkah bagi kita bahwa kemajemukan merupakan kekayaan dan kekuatan tetapi juga sekaligus adalah tantangan serta ancaman kita. Tantangan tersebut sangat terasa pada saat-saat bangsa Indonesia membutuhkan kebersamaan dan persatuan dalam situasi dimana unsur perpecahan dan kekerasan muncul serta mengancam eksistensi NKRI.

Karena itu saya sangat mendukung upaya sdr. Arief Poerboyo Moekiyat untuk menulis buku sebagai upaya menanamkan kembali rasa kebangsaan, semangat kebangsaan dan komitmen kebangsaan yang kuat. Pemantapan itu dapat dilakukan melalui pendidikan, keteladanan dan sosialisasi. Alat atau *tools* untuk melakukan sosialisasi salah satu yang terpenting adalah pedoman tertulis dalam bentuk buku sehingga proses tersebut bisa dilakukan dalam waktu lebih singkat, lebih massif dan lebih terukur. Buku berjudul *Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa* ini disusun dalam format yang mudah dibaca dan dicerna karena menggunakan metoda tanya-jawab maka saya optimis bahwa ini akan

memberi kontribusi besar bagi proses pemantapan wawasan kebangsaan di Indonesia.

Pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada gilirannya dapat memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan sekaligus untuk mendukung Gerakan Nasional Revolusi Mental sebagai bagian dari Nawa Cita pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Semoga buku ini bermanfaat bagi masyarakat dan khususnya bagi generasi muda Indonesia.

Jakarta, 27 Januari 2016

Menteri Koordinator

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan  
Republik Indonesia



Luhur B. Pandjaitan





## KATA PENGANTAR

**DEPUTI VI/KESATUAN BANGSA  
SELAKU KETUA DESK PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN  
KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur kami persembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan pertolongan, sehingga dapat dicetak kembali yang kedua kalinya Buku Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Dalam Bentuk Tanya Jawab.

Buku ini dicetak kembali dengan tambahan satu bab tentang Kesadaran Bela Negara (Bab V) pada tahun 2015. Tambahan materi ini diperlukan mengingat semakin besarnya tantangan dan ancaman bangsa, serta persaingan dan kompetisi antar bangsa dalam era globalisasi, khususnya mulai memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku pada 31 Desember 2015. Penerbitan kembali buku ini dapat dipandang sebagai pentingnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengaktualisasi pemantapan wawasan kebangsaan.

Jawaban atas pertanyaan dalam Buku ini tidak bersifat indoktrinasi dan bukan merupakan tafsir yang baku, mengingat semua ini berasal dari nilai-

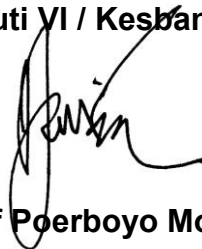
nilai Pancasila, dimana Pancasila adalah dasar negara dan ideologi terbuka (*open ideology, living ideology*), serta bukan dogma yang statis dan menakutkan. Pancasila diletakkan secara terhormat, menjadi sumber pencerahan, menjadi sumber inspirasi, dan sekaligus sumber solusi atas masalah-masalah yang hendak kita pecahkan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kami menyadari bahwa Buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, diperlukan saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakannya, agar Pemantapan Wawasan Kebangsaan ini dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan (*stake holders*). Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan perlindungan, serta kekuatan lahir dan batin kepada kita semua untuk dapat memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara tercinta. Amien!

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Jakarta, Januari 2016**

**Deputi VI / Kesbang**



**Arief Poerboyo Moekiyat**

# DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Menko Polhukam .....	i
Kata Pengantar Deputi VI/Kesbang.....	iv
Daftar Isi .....	vi
Daftar Gambar.....	vii
Bab I Pemantapan Wawasan Kebangsaan .....	1
Bab II Substansi Wawasan Kebangsaan .....	10
Bab III Karakter Bangsa .....	35
Bab IV Persatuan dan Kesatuan Bangsa .....	66
Bab V Kesadaran Bela Negara .....	83
Bab VI Penutup.....	100
Daftar Pustaka.....	102
Lampiran.....	108

# DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Lambang Negara Garuda Pancasila.....	13
Gambar 2.2 Peta NKRI.....	16
Gambar 2.3 Upacara Bendera di Sekolah.....	19
Gambar 3.1 Karakter Bangsa.....	39
Gambar 3.2 Bangsa Indonesia.....	41
Gambar 3.3 Persatuan Dalam Kebhinnekaan.....	45
Gambar 4.1 NKRI Harga Mati.....	69
Gambar 4.2 Deputi VI / Kesbang, Arief P. Moekiyat menyampaikan Sambutan pada Seminar Nasional Harmonisasi Sosial.....	75
Gambar 4.3 Menko Polhukam, Jenderal TNI (Purn.) Luhut B. Pandjaitan menyampaikan Arahan pada Rapat Koordinasi Nasional Kesatuan Bangsa.....	81
Gambar 5.1 Nilai-nilai Bela Negara.....	89
Gambar 5.2 Peringatan Hari Pahlawan.....	91
Gambar 5.3 Diklat Bela Negara di Jawa Timur.....	95
Gambar 5.4 Berbagai Profesi dan Peran Masyarakat Dalam Bela Negara.....	98







# B A B I

**PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN YANG BERSUMBER DARI EMPAT KOSENSUS DASAR BERINTIKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA (UUD NRI) TAHUN 1945, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA; UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN, SEMANGAT DAN TEKAD/KOMITMEN YANG KUAT SEBAGAI BANGSA INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL SEBAGAIMANA TERMAKTUB DALAM ALINEA KE-4 PEMBUKAAN UUD NRI TAHUN 1945**

**KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**



*“Bangsa yang Besar Adalah  
Bangsa yang Menghormati  
Jasa Para Pahlawannya”  
(Bung Karno)*

# BAB I

## PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN

### 1. Apakah yang dimaksud dengan Pemantapan Wawasan Kebangsaan?

- a. **Pemantapan** adalah proses kegiatan yang mengedepankan upaya-upaya untuk membuat seseorang atau keadaan menjadi mantap, teguh, dan stabil, sehingga dapat berlangsung lebih baik dari keadaan sebelumnya untuk menunjang kehidupan bersama sebagai satu kesatuan bangsa.
- b. **Wawasan Kebangsaan** adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa (*nation character*) dan kesadaran terhadap sistem nasional (*national system*) yang bersumber dari Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera.

Dalam memahami Wawasan kebangsaan, maka perlu diuraikan secara singkat tentang konsep kebangsaan Indonesia.

### 2. Apakah yang dimaksud dengan konsep kebangsaan?

Kebangsaan berasal dari kata dasar bangsa. Pengertian bangsa adalah jiwa yang mengandung kehendak untuk bersatu (*Ernest Renan*) atau seperti yang ditegaskan oleh Bung Hatta (BPUPKI, 1945) yang secara ringkas disebut sebagai himpunan masyarakat yang memiliki keinsyafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun menjadi satu, karena percaya akan nasib dan tujuan. Sedangkan Bung Karno (BPUPKI, 1945) memperluas pengertian “Bangsa” sebagai himpunan masyarakat yang bersama sama tinggal dalam suatu wilayah yang merupakan satu kesatuan geopolitik.

Dari ketiga tokoh tersebut, diperoleh pemahaman bahwa bangsa secara esensial ditentukan oleh 4 kriteria penentu, yaitu:

- a. Kehendak secara sadar (keinsyafan) untuk bersatu;
- b. Memiliki tujuan yang sama;
- c. Memiliki latar belakang sejarah yang sama;
- d. Wilayah yang sama sebagai satu kesatuan ruang hidup.

Empat kriteria penentuan tersebut memperjelas makna bahwa bangsa tidak terbentuk oleh kesamaan budaya, adat istiadat, agama, daerah asal, atau berbagai kesamaan ciri lahiriah semata.

Sebagai konsep, kebangsaan merupakan mekanisme kehidupan kelompok yang beragam, dengan ciri-ciri persaudaraan, kesetaraan, kesetiakawanan, kebersamaan, dan kesediaan berkorban. Konsep kebangsaan harus terus ditumbuhkan pada masyarakat bangsa, dan dikembangkan secara terstruktur yaitu berturut-turut pada tingkat kesadarannya kemudian menjadikannya sebagai semangat, dan mengaktualisasikannya dalam tekad/komitmen kebangsaan.

Ada beberapa faktor penguat dan sangat monumental berdirinya “negara bangsa”, yaitu diawali dengan timbulnya kebangkitan bangsa pada Tahun 1908 dan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

Kelahiran Boedi Oetomo Tahun 1908 telah menjadi tonggak yang menumbuhkan semangat perjuangan, sekaligus menjadi inspirasi berdirinya berbagai organisasi di seluruh pelosok tanah air, baik yang bersifat kedaerahan, politik, serikat pekerja, keagamaan, kewanitaan, maupun kepemudaan.

Pada gelombang berikutnya, muncul sejumlah organisasi seperti Sarekat Islam, dan berbagai organisasi lainnya. Hal ini mewarnai awal Kebangkitan Nasional, dan mencapai puncaknya pada tahun 1928, dengan bersatunya berbagai kelompok organisasi--- khususnya organisasi kepemudaan--- untuk mewujudkan suatu gerakan kebangsaan yang sejati, melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928: satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa – Indonesia.

Keberadaan suatu bangsa dalam bingkai negara, pada dasarnya dilandasi oleh 3 (tiga) hal mendasar yaitu: "kesadaran", "semangat" dan "tekad" yang kuat. Kesadaran meliputi dua fenomena realitas yaitu "kesadaran ruang" dalam arti pemahaman terhadap konfigurasi geografis, dan "kesadaran isi", yaitu kemajemukan dan heterogenitas kita sebagai bangsa, dalam aspek kultur, etnik, bahasa dan agama.

Selanjutnya, "semangat" yang dimaksud adalah spirit para *founding fathers* dan kita semua untuk mewujudkan fenomena realitas tadi menjadi satu "*entity*" ..... suatu kesatuan yang utuh.

Para pemuda dan pemudi Indonesia bersumpah/berikrar pada tanggal 28 Oktober 1928, menyatakan tekad/komitmen membangun suatu entitas baru yang menyatukan berbagai perbedaan besar diantara mereka, walaupun dalam kondisi lingkungan sosial politik yang tidak mendukung karena masih dalam penjajahan.

Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 baru dapat diwujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan sekarang kita bersyukur telah menikmati hidup sebagai bangsa yang diakui sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia dalam naungan NKRI. Namun, segala yang dapat dinikmati hingga saat ini tidak *taken for granted* tetapi harus dicapai dengan lika-liku dinamika perjuangan yang berat.

Pernyataan "bahasa" yang satu, yaitu Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu, bukan bahasa Jawa, membuat semua suku termasuk yang kecil-kecil merasa terakomodasi kehadirannya. Begitu pula dengan penggunaan Bangsa Indonesia, yaitu suku besar dan kecil melebur menjadi Bangsa Indonesia. Suku yang besar (Jawa) tidak menunjukkan "besarnya" tetapi menghormati kebanggaan suku kecil-kecil.

Bung Karno dalam pidato di BPUPKI, 1 Juni 1945, menegaskan bahwa "Kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatra, bukan kebangsaan Borneo,



Sulawesi, Bali atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia, yang bersama-sama menjadi dasar satu *nationale staat*”.

Faktor lainnya adalah kekuatan para Tokoh Pendiri Bangsa ini (*founding fathers*), yaitu saat menjelang kemerdekaan untuk menyusun suatu dasar negara. Pemeluk agama yang lebih besar (mayoritas Islam) menunjukkan jiwa besarnya untuk tidak memaksakan kehendaknya. Bunyi Pembukaan (*preamble*) yang sekarang ini, bukan seperti yang dikenal sebagai “Piagam Jakarta”. Hal ini juga terjadi karena tokoh-tokoh agama Islam yang dengan kebesaran hati (*legowo*) menerimanya. Disamping itu, komitmen dari berbagai elemen bangsa ini dan para pemimpinnya dari masa ke masa, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi yang konsisten berpegang teguh kepada 4 (empat) konsensus dasar, yaitu Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

### **3. Mengapa diperlukan Pematapan Wawasan Kebangsaan?**

Indonesia merdeka sebagai satu kesatuan negara bangsa, memiliki Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan falsafah atau pandangan hidup bangsa, yang terbukti tangguh dan memiliki kesaktian dalam melewati berbagai batu ujian dan dinamika sejarah sistem politik, sejak zaman demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin (Orde Lama), Orde Baru, hingga di Era Reformasi saat ini, sebagaimana yang termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab;
- c. Persatuan Indonesia;
- d. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan;
- e. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Di setiap zaman, Pancasila mampu melewati alur dialektika peradaban yang menguji ketangguhannya sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia, yang terus berkembang dan tak pernah berhenti di satu titik terminal sejarah.

Bahkan, dewasa ini ketika banyak pertanyaan dilontarkan oleh sebagian khalayak: *Di manakah Pancasila kini berada?*

Pertanyaan ini penting dikemukakan karena sejak era reformasi yang diikuti gelombang demokratisasi di berbagai bidang, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti “tersandar di sebuah lorong sunyi”, justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik.

*Mengapa hal itu terjadi? Mengapa seolah-olah kita melupakan Pancasila?*

Memasuki Era Reformasi pada Tahun 1998, kita semua merasakan adanya penolakan terhadap segala hal yang berhubungan dengan Orde Baru. Tidak hanya terhadap bentuk kegiatannya, bahkan terhadap istilah atau penamaan kegiatannya pun tidak mau memakainya. Ada anggapan bahwa jika menggunakan istilah yang berlaku pada masa Orde Baru, dikatakan tidak Reformis. Demikian halnya dengan Pancasila, yang pada masa Orde Baru upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dilakukan dengan cara yang sistematis, terstruktur dan masif. Penafsiran yang demikian ketat dan pengejawantahan yang justru memberi kesan membelenggu dan menakutkan bagi pihak-pihak yang ber-seberangan dengan Pemerintah, telah menyebabkan trauma yang cukup dalam. Hal tersebut menjadi salah satu sebab Pancasila dianggap hanya sekedar “simbol, instrumen politik dan alat kekuasaan”, sehingga cenderung ditinggalkan.

Pengaitan Pancasila dengan sebuah rezim pemerintahan tertentu, merupakan kesalahan mendasar. Pancasila bukan milik sebuah era atau identik dengan kekuasaan pemerintahan pada masa tertentu. Pancasila juga bukan representasi sekelompok orang, golongan atau orde tertentu. Pancasila adalah dasar

negara yang akan menjadi pondasi bangunan arsitektural yang bernama Indonesia. Sepanjang Indonesia masih ada, Pancasila akan selalu menyertai perjalanannya.

Rezim pemerintahan akan berganti setiap waktu dan akan pergi menjadi masa lalu, akan tetapi nilai-nilai Pancasila, yang menjiwai, menjadi landasan, sekaligus pandangan hidup, akan tetap ada dan tak akan menyertai kepergian sebuah orde pemerintahan.

Kita menyadari bahwa tantangan akan selalu ada, dan hanya mungkin dihadapi dengan kerja keras segenap warga bangsa secara terintegrasi. Oleh karenanya, kita perlu secara terus menerus membangun Pemantapan Wawasan Kebangsaan. Proses ini merupakan *Unfinish Agenda*, suatu proses yang kontiniu dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan globalisasi.

Oleh karena itu, semakin penting agar para penyelenggara negara di pusat dan daerah, serta masyarakat wajib berpegang teguh melaksanakan 4 (empat) konsensus dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### **4. Apa manfaat Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat maupun para elite politik?**

Pemantapan Wawasan Kebangsaan yang berintikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan pedoman dan sumber inspirasi, motivasi, dan kreativitas yang mengarahkan proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menuju masa depan yang dicita-citakan bersama bangsa Indonesia.

Melalui Pemantapan Wawasan kebangsaan kita dapat menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Selanjutnya dengan kerja keras seluruh komponen bangsa dalam membangun bangsa yang ditopang prasyarat stabilitas politik dan keamanan yang dinamis, serta supremasi hukum yang adil, maka akan terwujud tujuan nasional, yaitu Indonesia yang aman dan sejahtera,

sebagaimana termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam UU Nomor 2 tahun 2008 *Jo* UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, disebutkan bahwa kaderisasi politik termasuk para elit politik harus memuat Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika (4 Konsensus Dasar) yang merupakan basis fundamental yang memuat sejarah, kekinian, dan format Indonesia ke depannya. Oleh karena itu, para kader di partai politik wajib menghayati 4 konsensus tersebut dalam pola pemikiran dan tindakannya. Pemantapan wawasan kebangsaan diharapkan akan mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagai prasyarat untuk membangun bangsa, dan pada akhirnya memperkuat ketahanan nasional yang meliputi seluruh aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM).

## **5. Bagaimana strategi metode pelaksanaan Pemantapan Wawasan Kebangsaan?**

Strategi metode pelaksanaan Pemantapan Wawasan Kebangsaan adalah:

### **1) Pendidikan dan pembelajaran**

Penyelenggaraan pemantapan wawasan kebangsaan dilakukan melalui :

- a) Pendidikan formal, yaitu jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- b) Pendidikan nonformal, yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal seperti pelatihan pegawai, pelatihan kewirausahaan, keterampilan profesi, pelatihan kepemimpinan.

- c) Pendidikan informal, yaitu pendidikan keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab termasuk mengedepankan prinsip “mentransformasikan agama, bukan mengganggu tradisi.”
- d) Pendidikan jabatan, yaitu jalur pendidikan jabatan seperti Prajabatan dan pendidikan jabatan, struktural di lingkungan pemerintahan.

## 2) Sosialisasi

- a) Ceramah;
- b) Diskusi dan dialog;
- c) Pengalaman lapangan;
- d) Permainan (*outbond*);
- e) Bercerita atau bertutur;
- f) Estetika dan seni;
- g) Audio visual melalui media;
- h) Partisipasi kelompok;
- i) Curah pendapat;
- j) Bermain peran;
- k) Simulasi metode;
- l) Sandiwara;
- m) Peragaan;
- n) Permainan;
- o) Iklan layanan masyarakat.

## 3) Pembudayaan

Pembudayaan dapat dilakukan dengan memberikan penanaman nilai-nilai kebangsaan melalui keteladanan, pembiasaan, pengarahan seperti kegiatan dalam kepramukaan yang mengandung unsur pendidikan kesederhanaan, kemandirian, kesetiakawanan, kebersamaan, gotong-royong, kecintaan pada lingkungan, dan penanaman sportivitas, kerja sama dan kegigihan untuk berusaha.

## 4) Pemberdayaan

Pemberdayaan pemantapan wawasan kebangsaan dimulai dengan penanaman empati dan peduli yang dilakukan sejak dini dengan pemberdayaan keluarga, masyarakat, organisasi dan parpol, dunia usaha, dan media massa.



## 5) Kerjasama

Pemantapan nilai-nilai kebangsaan dapat dilakukan dengan bekerjasama antara lembaga, agen, dan pemerhati pengembangan karakter bangsa yang saling terkait, dan lain-lain.

## 6) Keteladanan

Dalam arti para pemimpin di tingkat pusat dan daerah termasuk para elit politik yang duduk pada lembaga tinggi negara, para pejabat pemerintah sipil, TNI dan Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh pendidikan, tokoh perempuan, dan lain-lain memberi contoh keteladanan yang baik kepada masyarakat, antara lain melalui ucapan dan tindakan yang satu kata (konsisten).

Pelaksanaan Pemantapan Wawasan Kebangsaan dilakukan dengan pendekatan *kognitif, afektif, andragogi, normatif, regulatif, egaliter*, dan tidak bersifat *indoktrinatif* atau tidak *dogmatis*.





## B A B II

**SEPANJANG NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) BERDIRI, MAKA PANCASILA SELALU MENYERTAINYA; YANG BERFUNGSI SEBAGAI DASAR NEGARA, IDEOLOGI NEGARA; DAN FALSAFAH ATAU PANDANGAN HIDUP BANGSA, DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA (UUD NRI) TAHUN 1945 SEBAGAI KONSTITUSI DAN HUKUM DASAR TERTULIS YANG TERTINGGI, SERTA SEMBOYAN NEGARA “BHINNEKA TUNGGAL IKA”, ATAU DISEBUT EMPAT KONSENSUS DASAR BANGSA.**

**KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**



*“Kobarkan Kembali Keberanian  
Kerelaan Berkorban Dan Kebersihan Hati  
Demi Masa Depan Bangsa yang Lebih Baik”  
(Bung Tomo)*

## BAB II

### SUBSTANSI WAWASAN KEBANGSAAN

#### 1. Substansi apa yang perlu dipahami dalam Wawasan Kebangsaan?

Pada dasarnya wawasan kebangsaan berintikan Empat Konsensus Dasar, sebagaimana yang telah diwariskan oleh para pendiri negara dan bangsa (*the founding fathers*), yaitu:

- a. Pancasila;
- b. UUD NRI Tahun 1945;
- c. NKRI;
- d. Bhinneka Tunggal Ika.

Selain Empat Konsensus Dasar, maka perlu dipahami dan diimplementasikan berbagai konsepsi untuk mendukung implementasi Pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu:

- a. Wawasan Nusantara;
- b. Ketahanan Nasional;
- c. Kewaspadaan Nasional;
- d. Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara;
- e. Kesadaran Bela Negara (dibahas tersendiri, Bab V).

Uraian singkat Empat Konsensus Dasar adalah sebagai berikut:

##### a. Pancasila

Nilai-nilai Pancasila meliputi nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis yang dikandung Pancasila baik sebagai dasar dan ideologi negara, maupun sebagai falsafah pandangan hidup bangsa, yaitu:

- 1) **Nilai Dasar:** Nilai yang tetap dan tidak dapat berubah yang rumusnya terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang berupa nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan yang sekaligus merupakan hakekat Pancasila.
- 2) **Nilai Instrumental:** Merupakan penjabaran dari nilai dasar yang merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia

yang berupa arahan, kebijakan, strategi, sarana dan upaya yang dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi, serta perkembangan jaman, dimana harus dipatuhi oleh masyarakat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- 3) **Nilai Praksis:** Nilai yang merupakan penjabaran dari nilai dasar dan nilai instrumental yang dilaksanakan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari seperti gotong royong, musyawarah mufakat, toleransi, dan lain-lain atau dapat disebut implementasi sifat-sifat karakter Bangsa (lihat 45 sifat karakter Bangsa pada Bab III).

Sedangkan ditinjau dari aspek kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, Ideologi negara dan falsafah atau pandangan hidup bangsa penjelasannya sebagai berikut:

#### 1) **Pancasila Sebagai Dasar Negara**

Pancasila sebagai dasar negara, mengatur perilaku negara, yang terwujud dalam pembuatan dan pelaksanaan perundang-undangan (Konstitusi, Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda) dan seterusnya), sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta implementasinya. Dilihat dari sistem hukum, norma-norma dasar Pancasila membentuk norma hukum yang di bawahnya secara berjenjang, norma hukum yang di bawah terbentuk berdasar dan bersumber pada norma hukum yang lebih tinggi.

Hal ini mengandung arti bahwa sebagai dasar negara, Pancasila harus menjadi landasan dalam penyusunan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang mencerminkan konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut di atas, maka dalam merumuskan pola dan sistem pemerintahan, dalam mendudukkan warga negara hidup bernegara, dalam mengatur kehidupan politik,

ekonomi dan sebagainya, mengacu pada cita hukum tersebut.

Dengan kata lain demokrasi yang diterapkan di Indonesia tiada lain adalah demokrasi yang berdasar Pancasila. Ekonomi yang diterapkan di Indonesia juga berdasar Pancasila. Hak asasi manusia mau tidak mau juga harus berdasar Pancasila pula.

## 2) Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Memaknai kembali Pancasila berarti kita ingin menegaskan komitmen, bahwa nilai-nilai Pancasila adalah ideologi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila bukanlah konsep pemikiran semata, melainkan sebuah perangkat tata nilai untuk diwujudkan sebagai panduan dalam berbagai segi kehidupan.

Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan etika dan moral ketika kita membangun pranata politik pemerintahan, ekonomi, pembentukan dan penegakan hukum, politik, sosial dan budaya serta berbagai aspek kehidupan lainnya.

Dalam konteks ideologi negara, Pancasila dapat dimaknai sebagai sistem kehidupan nasional yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM) dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan bangsa yang berlandaskan dasar negara.

Sebagai ideologi, Pancasila tidak untuk ditawarkan, tetapi semua komponen bangsa wajib untuk mengetahui dan memahami, serta melaksanakan nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

### 3) Pancasila Sebagai Falsafah atau Pandangan Hidup Bangsa.

Pancasila merupakan suatu sistem nilai yang dengan sadar dipilih sendiri oleh bangsa Indonesia dan diyakini kebenarannya, serta menimbulkan tekad untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



Sumber: [https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Garuda\\_Pancasila.jpg](https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Garuda_Pancasila.jpg)

**Gambar 2.1: Lambang Negara Garuda Pancasila**

Nilai-nilai kebangsaan yang berasal dari Pancasila adalah nilai religius, nilai kekeluargaan, nilai keselarasan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

Secara ringkas, Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara menegaskan bahwa bangsa kita adalah :

- 1) Mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai kebebasan masyarakatnya untuk beragama menurut keyakinannya masing-masing;
- 2) Mengakui bahwa setiap orang memiliki harkat dan martabat kemanusiaan yang sama;
- 3) Mengakui pentingnya Persatuan Indonesia;
- 4) Mengakui bahwa setiap Warga Negara sebagai rakyat memegang kedaulatan atas negara; dan
- 5) Mengakui bahwa setiap Warga Negara sebagai rakyat berhak mendapatkan Keadilan Sosial.



## **b. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)**

Ditinjau dari aspek sistematika, UUD NRI Tahun 1945 sebelum diubah terdiri atas tiga bagian (termasuk penamaannya), yaitu:

- 1) Pembukaan (Preamble);
- 2) Batang tubuh;
- 3) Penjelasan.

Setelah diubah, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (Tahun 1945 terdiri atas dua bagian, yaitu:

- 1) Pembukaan;
- 2) Pasal-Pasal (sebagai ganti istilah Batang Tubuh).

Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD NRI Tahun 1945 mengalami 4 (empat) kali perubahan (Amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:

- 1) Perubahan Pertama UUD NRI Tahun 1945 dilakukan pada Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999;
- 2) Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945 dilakukan pada Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000;
- 3) Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 dilakukan pada Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001;
- 4) Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945 dilakukan pada sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002.

Dengan telah dilakukannya perubahan UUD NRI Tahun 1945, konstitusi Indonesia telah menjadi sebuah konstitusi yang demokratis dan modern, yang dapat berfungsi sebagai panduan dasar dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa untuk mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adil dan makmur, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam kerangka itu semua komponen bangsa, baik penyelenggara negara maupun masyarakat wajib memahami, menghayati dan melaksanakan seluruh ketentuan UUD NRI Tahun 1945 secara konsisten dan konsekuen, karena dengan jalan demikian, keberadaan UUD

NRI Tahun 1945 yang telah disempurnakan ini memiliki makna dan membawa manfaat nyata bagi bangsa dan negara.

UUD NRI Tahun 1945 merupakan konstitusi dan hukum dasar tertulis yang tertinggi dalam penyelenggaraan negara yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh segenap bangsa Indonesia.

Secara ringkas, UUD NRI Tahun 1945, di dalam Pembukaan mengamanatkan bahwa :

- 1) Hak setiap manusia atas kemerdekaan dan bebas dari penindasan;
- 2) Tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi.

Adapun esensi nilai-nilai kebangsaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut:

- 1) Nilai demokrasi, mengandung makna bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan setiap warga memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggara pemerintahan;
- 2) Nilai kesamaan derajat, setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum;
- 3) Nilai ketaatan hukum, setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib menaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku.

### **c. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)**

Konsepsi NKRI juga telah mengilhami tumbuhnya suatu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri, bangsa dan Tanah Airnya yang terdiri dari masyarakat, suku bangsa, agama, adat-istiadat yang beragam sebagai suatu kesatuan di dalam negara kepulauan dalam berbagai aspek kehidupan. Konsepsi ini memberikan nilai dan semangat untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga keutuhan wilayah

negara, menjaga kedaulatan negara, dan bersama-sama menjaga ancaman dari bangsa-bangsa lain.

Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan sesuai Bab XVI tentang perubahan Undang-undang Dasar Pasal 37 ayat 5 UUD 1945 amandemen ke-IV yang menyatakan; “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.”. Dengan kata lain, NKRI adalah harga mati.



Sumber: <https://buzzerbeezz.files.wordpress.com/2012/11/21/peta-indonesia/>

### Gambar 2.2: Peta NKRI

Indonesia terletak di Antara  $95^{\circ}$  dan  $141^{\circ}$  Bujur Timur serta Antara  $6^{\circ}$  Lintang Utara dan  $11^{\circ}$  Lintang Selatan. NKRI sangat luas yang wilayahnya sering disebutkan dari “Sabang s.d. Merauke (Barat ke Timur) dan dari Miangas s.d. Rote (Utara ke Selatan)”, dengan jumlah penduduk Indonesia yang tercatat hingga Desember 2013 berjumlah 253.602.815 jiwa (Ditjen Administrasi Kependudukan, Kemendagri) dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau, diantaranya sebanyak 13.466 pulau telah memiliki nama dan tercatat di PBB (sumber: Badan Informasi Geospasial) yang sebagian besar tidak berpenghuni. Disamping itu, kita memiliki 92 pulau terluar, terdiri dari 31 pulau berpenduduk dan 61 pulau tidak

berpenduduk (Perpres Nomor 78 Tahun 2005), dimana 12 pulau terluar berbatasan langsung dengan negara lain. Disamping itu, memiliki garis pantai sepanjang 81.000 Km yang terpanjang kedua di dunia setelah negara Kanada.

Sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 25A, dinyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-undang”. Pada saat ini telah terbit Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang memuat pengertian tentang Wilayah Negara yaitu salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Bapak Presiden Jokowi dalam pidato pelantikan sebagai Presiden pada tanggal 20 Oktober 2014 menyebutkan bahwa “Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalesveva Jayamahe, di Laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana”

NKRI adalah Negara kepulauan berwawasan nusantara, batas wilayah di laut mengacu pada UNCLOS (*United Nations Convension On the Law Of the Sea*) 1982 yang kemudian diratifikasi dengan UU Nomor 17 Tahun 1985. Pembagian daerah NKRI disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang. Ungkapan “dibagi atas” (bukan “terdiri atas”) dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

bukanlah istilah yang digunakan secara kebetulan. Ungkapan itu digunakan untuk menjelaskan bahwa negara kita adalah negara kesatuan yang berkedaulatan negara berada di pemerintah pusat. Berbeda dari “terdiri atas” yang lebih menunjukkan substansi federalisme, karena istilah itu menunjukkan letak kedaulatan berada di tangan negara-negara bagian.

Adapun nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam NKRI adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai kesatuan wilayah, negara kepulauan; merupakan konsekuensi sifat unilateral dari perairan merupakan pemersatu pulau-pulau;
- 2) Nilai Persatuan Indonesia, merupakan konsekuensi dari bangsa yang bersifat plural, banyak suku, agama, dan budaya;
- 3) Nilai kemandirian, membangun bangsa dilaksanakan oleh kekuatan sendiri, bantuan dari luar sifatnya memperkuat untuk mengatasi kekurangan secara nasional. Kemandirian juga diatur sampai daerah dimana daerah otonom diberikan kewenangan mengatur daerahnya sesuai dengan wewenang yang diatur dalam Undang-undang.

Hakekat NKRI secara historis dan filosofis dapat dipahami beberapa hal, sebagai berikut:

- 1) Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda adalah perjuangan untuk meletakkan nilai-nilai dasar Persatuan Bangsa, serta Kesatuan Wilayah Indonesia.
- 2) Proklamasi Kemerdekaan NKRI, adalah komitmen dasar tentang pentingnya kemerdekaan dan demokrasi serta hak asasi manusia (HAM) dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara serta hubungan antar bangsa.
- 3) Negara yang didirikan atas kehendak bersama, bukan atas kehendak sekelompok untuk mencapai cita-cita nasional, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

- 4) Negara yang dibangun adalah untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, serta seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut serta dalam perdamaian dunia.

Secara ringkas, prinsip NKRI mengamanatkan kepada kita bahwa Negara Indonesia yang mewadahi bangsa kita adalah Satu-Kesatuan yang utuh, dan harus selalu diingat bahwa yang menyatukan kita adalah rasa kebangsaan, semangat dan tekad dalam bentuk komitmen kebangsaan itulah, maka kita menjadi sebuah bangsa yang utuh dan bersatu.



Sumber: <https://sdnmargajayaiv.wordpress.com/2011/09/05/tata-upacara-bendera/>

**Gambar 2.3: Upacara Bendera di Sekolah**

#### **d. Bhinneka Tunggal Ika**

Konsep Bhinneka Tunggal Ika mengandung tiga unsur utama:

- 1) Ada keanekaragaman atau kemajemukan;
- 2) Keanekaragaman atau kemajemukan merupakan kenyataan yang tidak dapat ditolak, alamiah;
- 3) Terintegrasi dalam satu negara bangsa Indonesia.

Keanekaragaman atau kemajemukan yang dimaksud adalah segala macam isi wilayah negara bangsa Indonesia, yaitu suku bangsa, bahasa, adat istiadat, kepentingan dan lain-lain, lebih bernuansa non fisik daripada fisik.

Esensi Bhinneka Tunggal Ika berupa nilai *pluralis* dan *multikulturalis*, yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran, yaitu:

- 1) Bahwa adanya kesadaran terhadap realita bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, etnis dan ras, agama, adat istiadat, budaya dan bahasa yang berbeda satu sama lain;
- 2) Bahwa dalam kehidupan berbangsa yang majemuk dan multikultur harus menjunjung tinggi toleransi, perlu penghormatan dan pengorbanan satu sama lain, perlu menjaga hubungan yang seimbang dan harmoni, memerlukan saling kepedulian yang tinggi, dan cara pandang yang mencerminkan sikap dan perilaku yang sederajat, serta tidak ada pelemahan dan memandang rendah posisi diantara mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 3) Bahwa dalam kehidupan yang plural dan multikultural secara integral mengandung jiwa dan semangat : penghormatan dan kesederajatan (*respect and equality*), kebebasan (*fairness*), non-diskriminasi, solidaritas, dan toleransi (*non discrimination, solidarity and tolerancy*), kepedulian (*empathy*), kekeluargaan/gotong royong (*cooperation*), tanggung jawab (*responsibility*), dan kepercayaan (*trust*),

Keberagaman bangsa Indonesia yang multikultur dan multi-etnis adalah sebuah realitas yang telah sejak lama disadari oleh bangsa Indonesia. Realitas keberagaman ini dapat bertahan hingga saat ini disebabkan adanya semangat untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan, serta tidak mempertentangkan disparitas antara satu dengan yang lain. Perbedaan tersebut diterima sebagai suatu kewajaran dan yang paling utama menonjolkan persamaan melalui persatuan dan menyerasikan perbedaan menjadi satu kesatuan, satu tujuan, satu tindakan menuju satu cita-cita bersama.



Perbedaan adalah kenyataan yang harus diterima dan bukan untuk dipertentangkan. Indonesia memiliki 1.128 suku bangsa, 719 bahasa lokal/daerah, dan mayoritas penduduknya menganut enam agama besar, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu. Disamping itu, mempunyai 23 lingkungan adat, 300 gaya seni tari, dan 485 lagu daerah (sumber: BPS).

Seluruh warga negara Indonesia, memiliki harkat dan kehormatan yang sama. Dalam perspektif berbangsa, tugas kita adalah merawat dan menjaga kemajemukan. Dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kita harus menumbuhkan solidaritas sosial yang dibangun berdasarkan nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal dengan memperkuat kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Inilah sendi-sendi utama dalam membangun Indonesia yang maju, beradab, kuat, dan bersatu berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Secara ringkas, semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” mengamanatkan kepada kita untuk memelihara kerukunan dan toleransi terhadap setiap perbedaan. Semboyan ini menjadi penting karena kita hidup dalam masyarakat yang sangat beragam, baik suku, agama, keyakinan, bahasa, dan adat istiadat.

## **2. Konsepsi apa yang dibutuhkan dalam implementasi pemantapan Wawasan Kebangsaan?**

Konsepsi untuk mendukung implementasi Pemantapan Wawasan Kebangsaan yang berpedoman kepada Empat Konsensus Dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, di implementasikan dengan konsepsi Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Kewaspadaan Nasional, serta Etika Berbangsa dan Bernegara dengan uraian singkat sebagai berikut:



### **a. Wawasan Nusantara (Wasantara)**

Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan yang utuh di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Wawasan Nusantara mengajarkan mawas kedalam agar bangsa Indonesia mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah, serta keterpaduan pada segenap aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk mengutamakan kelestarian lingkungan hidup tanah air Indonesia sebagai wadah dan ruang hidup bangsa. Sedangkan mawas keluar menjamin kepentingan nasional dalam kehidupan antar bangsa, dan turut serta menciptakan perdamaian dunia yang adil dan sejahtera.

Kepentingan nasional Indonesia yang utama adalah: tetap tegaknya kedaulatan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, terjaminnya integritas dan identitas nasional, serta berhasilnya pembangunan nasional. Tanpa persatuan dan kesatuan, kelestarian lingkungan hidup dan jaminan bagi kepentingan nasional, maka pencapaian tujuan nasional akan tersendat-sendat dan bahkan akan terjadi penyimpangan, atau kemunduran dalam pembangunan nasional.

Dalam wawasan nusantara terkandung 4 (empat) nilai pokok, yaitu:

- 1) Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik;
- 2) Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi;

- 3) Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya;
- 4) Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan;

#### **b. Ketahanan Nasional**

Ketahanan Nasional (Tannas) adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) baik yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung maupun yang tidak langsung yang mengancam dan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional.

Konsepsi ketahanan nasional yang dikembangkan berdasarkan Geostrategi Indonesia, mencerminkan keterpaduan delapan gatra (Astagatra) kehidupan nasional yang meliputi Trigatra alamiah (statis), meliputi: geografi, kekayaan alam, kependudukan dan Panca Gatra sosial (dinamis) yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, atau disingkat IPOLEKSOSBUDHANKAM yang resultantnya akan mewujudkan ketahanan nasional.

Secara ringkas, Ketahanan Nasional dapat dibedakan dengan Wawasan Nusantara, tetapi tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Ketahanan nasional harus dibina berdasarkan Wawasan Nusantara yang merupakan Geopolitik. Kehidupan nasional secara universal biasanya distratakan menjadi suprastruktur (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), infrastruktur (Parpol, Ormas, lembaga pendidikan, LSM kalangan dunia usaha, dan pers), dan sub struktur (Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, tokoh pemuda, dan perempuan). Dalam

kehidupan nasional Indonesia, dikenal kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Partai politik dan ormas sesuai fungsinya dapat menyerap aspirasi masyarakat dan mengartikulasikan kedalam kepentingan Partai Politik dan Ormas untuk selanjutnya disalurkan pada suprastruktur dan diperjuangkan dengan mengindahkan budaya politik Pancasila (demokratis, musyawarah untuk mufakat, tidak memaksakan kehendak, dan tidak adu kekuatan) yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi dan kelompoknya.

### **c. Kewaspadaan Nasional**

Kewaspadaan Nasional atau Padnas adalah kesadaran dan kesiapsiagaan bangsa untuk melihat dengan cermat masalah-masalah yang dihadapi secara nasional, baik dalam bentuk kerawanan atau dalam bentuk Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT), serta mampu menemukan peluang yang terbuka, sehingga dapat mengambil sikap dan keputusan yang benar dan komprehensif bagi keutuhan bangsa dan NKRI.

Kewaspadaan Nasional juga merupakan sikap yang berkaitan dengan kepedulian terhadap nasionalisme untuk menghasilkan kualitas deteksi dini, peringatan dini, cegah awal, tangkal awal, dan tanggap awal terhadap ancaman. Yang dimaksud dengan ancaman pada era reformasi diartikan sebagai sebuah kondisi, tindakan, potensi, baik alamiah atau hasil suatu rekayasa, berbentuk fisik atau non fisik, berasal dari dalam atau luar negeri, secara langsung atau tidak langsung diperkirakan atau diduga atau yang sudah nyata dapat membahayakan tatanan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam rangka pencapaian tujuan nasionalnya. Ancaman potensial dan manifes yang dihadapi Indonesia adalah disintegrasi sosial sampai dengan disintegrasi nasional yang bersumber dari letupan dan ledakan konflik sosial yang perlu disikapi dengan implementasi Kewaspadaan Nasional.

Pada era masa lalu (Orde Baru) pengertian Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) dalam Kewaspadaan Nasional adalah sebagai berikut:

- 1) **Ancaman** adalah tindakan, potensi, atau kondisi yang mengandung bahaya dan bersifat konseptual, baik tertutup maupun terbuka yang bertujuan mengubah Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dan menggagalkan pembangunan nasional.
- 2) **Gangguan** adalah potensi atau kondisi yang mengandung bahaya dan tidak bersifat konseptual. Gangguan itu berasal dari luar diri sendiri yang bersifat merongrong pelaksanaan, mengurangi kemurnian pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945, dan mengurangi kelancaran pembangunan nasional.
- 3) **Hambatan** adalah tindakan, potensi, atau kondisi yang mengandung bahaya dan tidak konseptual. Hambatan itu berasal dari dalam diri sendiri, dalam arti tidak melaksanakan Pancasila, menentang UUD NRI Tahun 1945, dan tidak berpartisipasi dalam pembangunan nasional.
- 4) **Tantangan** adalah tindakan, potensi, atau kondisi baik dari luar maupun dari dalam diri sendiri yang membawa masalah untuk diselesaikan serta dapat menggugah kemampuan diri.

Sesuai Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara maka terdapat dua jenis ancaman, yaitu ancaman militer dan ancaman non militer. Yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Sementara yang dimaksud dengan ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Ancaman itu sendiri dapat berasal, baik dari luar maupun dalam negeri. Kedua-duanya selalu memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi sehingga sulit untuk dapat dipisahkan.

Ancaman yang datang dari luar negeri seperti *invasi* atau *agresi* dari negara lain berdasarkan perkiraan, ancaman dalam bentuk itu kecil kemungkinannya. Ancaman yang paling mungkin dari luar negeri terhadap Indonesia adalah kejahatan yang terorganisasi yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara untuk memperoleh keuntungan dengan memanipulasi kondisi dalam negeri dan keterbatasan aparatur pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan.

Oleh karena itu, perkiraan ancaman yang lebih memungkinkan adalah ancaman non militer, yaitu setiap aksi yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan NKRI.

Salah satu ancaman terkini yang dihadapi di dalam negeri, antara lain masalah narkoba, radikalisme, terorisme, separatisme, dan konflik sosial. Kondisi ancaman yang dihadapi, tidak lagi bersifat tradisional belaka, tetapi sudah non tradisional, dan tidak lagi bersifat simetrik semata, tetapi sudah asimetrik.

Berbagai konflik sosial yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, pada umumnya merupakan hasil irisan dari berbagai masalah: politik, ekonomi, hukum, etnis dan budaya, dimana setiap konflik memiliki karakter lokal yang kental dan kadang kala bernuansa etnik/suku dan agama, sehingga menimbulkan tindak kekerasan yang menimbulkan “daya ledak” atau kerusakan besar yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian harta benda. Tidak ada solusi tunggal untuk menangani konflik sosial.

Belajar dari beberapa peristiwa penanganan konflik yang pernah terjadi di beberapa daerah pada sekitar awal reformasi, maka diperlukan kewaspadaan dini terhadap konflik sosial yang terjadi dan diatasi melalui paradigma penciptaan integrasi sosial yang meliputi integrasi bangsa, integrasi wilayah, dan perilaku *integratif*. Paradigma tersebut dapat diaplikasikan dalam kerja-kerja praktis yang meliputi:

- 1) Meningkatkan deteksi dini dan cegah dini. Pemberitahuan yang cepat dan respon yang tepat bila terjadi keganasan atau tanda-tanda bahwa komunitas di satu wilayah sedang menghadapi situasi permusuhan yang cenderung meningkat, maka perlu segera ditangani secara sungguh-sungguh. Hal ini merupakan langkah antisipasi dengan deteksi dini dan cegah dini untuk mencegah timbulnya konflik sosial.
- 2) Konflik pada dasarnya tidak bisa dimatikan karena pada dasarnya ia realitas inheren akibat perbedaan kepentingan dan menjadi bagian dari warisan sejarah konflik komunal yang berbeda identitas. Kita hanya bisa melakukan upaya pencegahan dan pengelolaan konflik khususnya di daerah untuk memperkuat solidaritas dan soliditas sosial. Hal ini harus ditandai dengan terbangunnya rasa persaudaraan, toleransi, kerukunan, harmoni sosial dan kohesi sosial masyarakat.
- 3) Mengedepankan peran kepemimpinan yang memiliki kepedulian dan kepekaan yang tinggi pada kerukunan dan harmoni sosial, serta membangun solidaritas sosial. Para pemimpin di daerah seperti Kepala desa, lurah, camat, bupati/walikota, para tokoh masyarakat, pemuka agama, pemuka adat, aparat kepolisian daerah, dan aparat komando teritorial TNI harus memiliki kepekaan yang tinggi dan memberi perhatian terciptanya kerukunan sosial. Demikian pula para pemimpin di tingkat nasional dan elit-elit politik harus memperhatikan hal tersebut. Sebaliknya, sikap acuh tak acuh dari lapisan kepemimpinan di pusat dan daerah, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama terhadap masalah ini akan menyuburkan benih konflik yang bisa meledak, antara lain yang terkait dan bernuansa SARA.
- 4) Melakukan pemisahan dan penyekatan, apabila terjadi benturan antar kelompok, dan diupayakan untuk mencegah perluasan agar tidak timbul korban yang lebih besar dengan tindakan cepat, tepat dan tegas, serta proporsional.

Penegakan hukum mutlak harus dilakukan bagi pihak yang menyerang, membakar, membunuh, dan merusak berbagai fasilitas umum dan sosial.

- 5) Melaksanakan perdamaian cepat dengan melibatkan tokoh masyarakat, adat, dan agama serta pemerintah daerah yang difasilitasi oleh aparat Polri dan TNI. Hal ini akan berdampak menurunkan emosi masyarakat.

Beberapa pola penanganan di atas sudah diterapkan untuk menyelesaikan konflik di beberapa daerah seperti Maluku, Poso, dan Sampit, maupun beberapa daerah yang mengalami konflik dalam beberapa waktu terakhir ini. Dari sini dapat dipahami bahwa penyelesaian konflik tidak bisa diselesaikan hanya oleh aparat kepolisian dan TNI. Dalam konteks pencegahan konflik sosial dan peningkatan kerukunan sosial di daerah, maka peran tokoh masyarakat, pemuka agama, dan tokoh adat di tingkat bawah (akar rumput) bersama pemerintah daerah merupakan kunci untuk menjaga stabilitas dan kewaspadaan nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam menghadapi konflik sosial, maka telah ditetapkan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Disamping itu, Pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan yang bersifat operasional berupa Inpres Nomor 2 tahun 2013 dan dilanjutkan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan keamanan Dalam Negeri dalam menangani berbagai potensi konflik yang dikelompokkan, antara lain konflik berlatar belakang Lahan/SDA, SARA, Politik dan Batas Wilayah, serta berlatar belakang Industrial. Saat ini sudah ditetapkan PP Nomor 2 Tahun 2015 sebagai panduan pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2012.

#### **d. Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara**

Sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, pengertian etika kehidupan berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama,

khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, berperilaku dan bertindak bagi setiap warga bangsa. Sedangkan pengertian etika menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban (akhlak).

Suatu bangsa dikatakan berperadaban tinggi apabila warga bangsa tersebut bertindak sesuai dengan aturan main yang disepakati bersama, yaitu etika yang sering disebut *unggah-ungguh*, tata krama, sopan santun dan budi pekerti. Warga yang mempunyai etika akan mampu secara baik menempatkan diri dalam pergaulan sosial yang akan sangat menentukan keberhasilan dalam hidup bermasyarakat.

Intisari dari ketetapan MPR RI dimaksud berisi pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa yang mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, *sportivitas*, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa, relevan untuk dipraktekkan dalam situasi dan kondisi kekinian.

Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 menguraikan tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Arah Kebijakan, yaitu:

**1) Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara terdiri atas:**

a) Etika Sosial Budaya

Etika sosial budaya bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling menolong diantara sesama warga bangsa. Menumbuhkembangkan budaya malu, yaitu malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Juga perlu ditumbuhkan kembali budaya keteladanan yang diwujudkan dalam perilaku para



pemimpin, baik formal maupun informal pada setiap lapisan masyarakat.

Tantangan saat ini adalah munculnya sebagian pemimpin yang cenderung tidak terbiasa lagi meletakkan tangan di atas (memberi), melainkan menaruh tangan di bawah (menerima). Mereka seolah-olah mengalami kemiskinan permanen, dan tidak pernah merasa cukup dengan harta yang telah dimilikinya, sehingga mengambil hak orang lain, antara lain dengan cara korupsi, pungutan liar, dan lain-lain.

Etika sosial budaya diperlukan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kembali kehidupan berbangsa yang berbudaya tinggi dengan menggugah, menghargai, dan mengembangkan budaya nasional yang bersumber dari budaya daerah dan kearifan lokal, agar mampu melakukan adaptasi, interaksi dengan bangsa lain, serta tindakan proaktif sejalan dengan tuntutan globalisasi. Untuk itu, diperlukan penghayatan dan pengamalan agama yang benar, serta kemampuan beradaptasi, ketahanan dan kreativitas budaya dari masyarakat.

#### b) Etika Politik dan Pemerintahan

Etika Politik dan Pemerintahan mengandung amanat bagi setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik, apabila terbukti melakukan kesalahan atau secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum, serta rasa keadilan masyarakat.

Etika politik dan pemerintahan berkaitan erat dengan kehidupan sosial politik, kesejahteraan bersama, dan keadilan sosial. Karena itu etika ini perlu diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik, tidak melakukan kebohongan publik, serta

tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya.

c) Etika Ekonomi dan Bisnis

Etika ekonomi dan bisnis mengandung makna tentang pentingnya persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan saing, serta terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan.

Etika ini mencegah terjadinya praktek-praktek *monopoli* dan *oligopoli*, kebijakan ekonomi yang mengarah kepada KKN dan diskriminasi. Minimnya etika di bidang ini menimbulkan akibat negatif seiring dengan munculnya dominasi kapitalisme yang bersandar pada premis kaum *libertarian* bahwa kebebasan hasrat manusia harus dijamin dan hanya dengan kebebasan hasrat itulah akan dicapai kemajuan di bidang ekonomi.

Pelaku ekonomi dan bisnis yang menghalalkan segala cara dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain melalui KKN. KKN dapat terjadi diawali dengan nepotisme (hubungan keluarga/kekerabatan/pertemanan yang bersifat khusus), kemudian diikuti dengan kolusi (kerjasama/persekongkolan yang jahat), dan pada akhirnya menimbulkan korupsi yang merugikan bangsa dan Negara.

d) Etika Keilmuan

Etika ini dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk

mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya.

Etika ini diwujudkan baik secara pribadi maupun kolektif dalam karsa, cipta, dan karya, yang tercermin dalam perilaku kreatif, *inovatif*, *inventif*, dan komunikatif dalam kegiatan membaca, belajar, meneliti, menulis, berkarya, serta menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

e) Etika Lingkungan

Etika lingkungan menegaskan pentingnya kesadaran menghargai dan melestarikan alam dan lingkungan hidup, serta penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Contoh nyata dari pentingnya etika lingkungan adalah penertiban ijin terkait dengan Sumber Kekayaan Alam (SKA) di darat, misalnya ijin Perkebunan dan Kehutanan, maupun di laut yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

f) Etika Penegakan Hukum Yang Berkeadilan

Dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak pada keadilan.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan ditujukan untuk menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum, sekaligus pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Etika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap warga negara di hadapan hukum, serta menghindari penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya.

Para penyelenggara negara merupakan representasi rakyat yang harus memiliki kepekaan dalam menjunjung tinggi rasa keadilan berdasarkan hukum. Dalam mengemban tugasnya, tidak hanya bersandar pada legitimasi hukum, tetapi juga mengedepankan legitimasi moral.

Disamping itu, sesuai Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen) yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para penyelenggara Negara dan pemimpin pemerintahan.

Meskipun UUD itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan baik, UUD itu tentu tidak akan merintang jalannya negara.

## **2) Arah Kebijakan Etika Berbangsa dan Bernegara**

Kebijakan membangun Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara diarahkan untuk:

- a) Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pendidikan formal, informal dan non-formal, serta pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat.
- b) Mengarahkan orientasi pendidikan yang mengutamakan aspek pengenalan menjadi pendidikan yang bersifat terpadu dengan menekankan ajaran etika yang bersumber dari ajaran agama dan budaya luhur bangsa serta pendidikan watak dan budi pekerti yang menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kematangan emosional dan spiritual, serta amal kebajikan.
- c) Mengupayakan agar setiap program pembangunan dan keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa dan

bernegara, dijiwai oleh nilai-nilai etika dan ahlak mulia, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

Nilai-nilai etika dan moral harus benar-benar hidup didalam sanubari dan kehidupan bangsa Indonesia. Atas dasar itu semua, perlu upaya dan langkah konkrit untuk membebaskan bangsa Indonesia dari situasi yang semakin memprihatinkan, serta semakin membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Pendidikan etika merupakan pendidikan karakter yang berbeda dengan pendidikan yang bersifat transfer ilmu pengetahuan, karena dalam proses ini peran keteladanan jauh lebih besar pengaruhnya terhadap pembentukan etika.

Persoalan etika bernegara tidak dapat hanya diselesaikan oleh negara dan para aparatnya, tetapi juga memerlukan partisipasi penuh masyarakat. Secara tidak langsung mencerminkan perilaku kehidupan masyarakat.

Para penyelenggara negara termasuk aparat pemerintahan di pusat dan daerah harus memiliki etika berbangsa dan bernegara yang sekaligus menjadi model bagi anggota masyarakat dalam bentuk keteladanan. Sebaliknya masyarakat diharapkan juga mempunyai etika yang baik dan memperhatikan kearifan lokal.

Dengan demikian, karena saling berkaitan satu sama lain, diperlukan langkah-langkah yang terpadu, simultan dan sinergis dengan berpedoman pada 4 (empat) Konsensus Dasar, serta mengimplementasikan konsepsi Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, dan Kewaspadaan Nasional, serta Etika Berbangsa dan Bernegara maupun kesadaran Bela Negara (BAB V) untuk mewujudkan Pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.





## B A B III

**MEMBANGUN KARAKTER BANGSA  
(NATION AND CHARACTER BUILDING);  
SANGAT DIBUTUHKAN SEBAGAI SALAH SATU  
MODAL BANGSA UNTUK MENJADI BANGSA YANG UNGGUL,  
MAJU, DAN SEJAHTERA, DEMI TERWUJUDNYA TUJUAN  
NASIONAL SEBAGAIMANA TERMAKTUB DALAM  
ALINEA KEEMPAT PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG  
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**



*“Beri Aku 1.000 Orang Tua,  
Niscaya Akan Kucabut Semeru Dari Akarnya...  
Beri Aku 10 Pemuda Niscaya Akan  
Kuguncangkan Dunia”  
(Bung Karno)*



## **BAB III**

### **KARAKTER BANGSA**

#### **1. Apa yang dimaksud dengan karakter bangsa?**

Karakter bangsa adalah karakter dari individu atau pribadi yang menjadi identitas atau jati diri bangsa. Karakter, artinya kepribadian termasuk didalamnya cara berpikir, nilai-nilai dan watak yang tercermin melalui sikap, perilaku, dan tindakan yang menjadi ciri-ciri bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang mempedomani Empat Konsensus Dasar, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

#### **2. Mengapa dibutuhkan pembangunan karakter bangsa?**

Pembangunan karakter bangsa diperlukan karena bertujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, dan beretika berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia Indonesia yang berkepribadian, beriman, berbudi luhur, bergotong royong, berkembang, dinamis, dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya bangsa.

#### **3. Bagaimana hubungan Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan pembangunan karakter bangsa?**

Pemantapan wawasan kebangsaan dan pembangunan karakter bangsa seperti “satu koin yang mempunyai dua sisi”, yaitu dimana satu sama lain tidak dapat dipisahkan, saling berhubungan, saling melengkapi, dan saling memperkuat, karena keduanya bersumber dari Empat Konsensus Dasar. Karakter bangsa pada dasarnya merupakan bagian penting dalam implementasi pemantapan wawasan kebangsaan yang dicerminkan dengan sikap, perilaku dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari warga negara Indonesia.

#### 4. Bagaimana perbedaan dan kesamaan Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan pembangunan karakter bangsa?

Wawasan kebangsaan dan karakter bangsa mempunyai kesamaan dalam membangun jiwa bangsa Indonesia (non fisik) sebagaimana frasa lirik lagu Indonesia Raya, yakni “*bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya*”. Karakter Bangsa adalah perwujudan Nilai Praksis Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Wawasan kebangsaan dan karakter bangsa mengandalkan strategi pendekatan melalui pendidikan dan menonjolkan faktor keteladanan sesuai budaya bangsa. Perbedaannya adalah pada upaya-upaya pendekatan dalam proses transformasi kepada seseorang atau kelompok masyarakat, dimana pembangunan karakter bangsa lebih menekankan pada pendidikan formal di sekolah, mulai dari tingkat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK (Taman Kanak-Kanak), Sekolah Dasar (SD) sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Umum (SMU), termasuk karakter sopan santun dan budi pekerti untuk memperkuat Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Dalam kurikulum pendidikan 2013 hal tersebut telah dicantumkan sebagai pendidikan karakter, sehingga wajib dilaksanakan pada tahun 2014 dan seterusnya. Pendidikan karakter juga merupakan pendidikan etika yang berbeda dengan pendidikan yang bersifat transfer ilmu pengetahuan, karena dalam proses ini peran keteladanan jauh lebih besar pengaruhnya terhadap pembentukan etika.

Sedangkan pemantapan wawasan kebangsaan, strategi pendekatannya lebih menitik-beratkan melalui pendidikan non-formal kepada orang dewasa, khususnya kepada suprastruktur (penyelenggara negara: eksekutif, legislatif, dan yudikatif), infrastruktur (partai politik, ormas, LSM, dan media massa), dan sub struktur (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pelaku usaha, serta masyarakat).

Keduanya merupakan hal yang sangat penting sebagai pondasi pembangunan SDM Indonesia menuju keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kematangan emosional dan spiritual, serta amal kebajikan.

**5. Bagaimana membangun SDM Indonesia dan menumbuhkan rasa kebangsaan (nasionalisme) bagi anak-anak remaja di sekolah?**

Untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh, dibutuhkan pendidikan yang ditopang dengan *national character building* atau pembangunan pendidikan karakter. Harus diakui bahwa semangat euforia reformasi membawa ekses buruk yang di kemudian hari baru disadari, diantaranya dengan membubarkan BP7, menghapuskan Pendidikan Budi Pekerti dan menggantikannya menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dimana lebih banyak muatan hak asasi manusia dan otonomi daerah. Akibatnya lebih banyak tuntutan akan hak, dibandingkan dengan pemenuhan kewajiban.

Pendidikan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap yang dibentuk dengan karakter yang baik. Kita patut bersyukur dalam Kurikulum Pendidikan 2013, hal tersebut sudah diperbaiki dengan menegaskan kembali adanya pendidikan karakter yang wajib diimplementasikan dengan baik. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang utuh, tidak sekedar maju secara materiil, namun juga spritual.

Oleh karena itu, ada banyak cara yang dapat ditempuh untuk memperkuat kembali membangun karakter bangsa, antara lain:

- a. Mewajibkan anak-anak sekolah TK dan SD sebelum masuk kelas untuk berbaris agar berlatih disiplin, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan membaca doa di kelas sebelum pelajaran sekolah dimulai;
- b. Meningkatkan kualitas generasi muda melalui pembinaan Pramuka yang merupakan kewajiban pendidikan ekstra kurikuler sekolah sesuai Kurikulum Tahun 2013;

- c. Mempelajari sejarah perjuangan Bangsa dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi;
- d. Pelatihan Bela Negara bagi generasi muda;
- e. Memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap jam 6 pagi di seluruh stasiun televisi dan radio milik pemerintah dan swasta;
- f. Mengadakan upacara bendera bagi kantor Pemerintah dan swasta setiap bulan tanggal 17;
- g. Memperingati Hari Besar seperti HUT Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus, Sumpah Pemuda 28 Oktober, Hari Pahlawan 10 November dan Hari Bela Negara 19 Desember;
- h. Memperkenalkan peta wilayah Indonesia yang luas dengan mengkomparasikannya dengan wilayah lain, misalnya dengan peta Benua Eropa atau negara lain, dan seterusnya.

Hal-hal yang diuraikan diatas, agar dapat mempertebal dan memperkuat rasa nasionalisme dan menumbuhkan rasa cinta tanah air terhadap negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai bersama.

## **6. Bagaimana hubungan Karakter Bangsa dengan Etika Berbangsa?**

Karakter mempunyai hubungan yang erat dengan Etika, karena karakter merupakan nilai-nilai kepribadian yang bersumber dari Empat Konsensus Dasar. Etika merupakan perwujudan dari karakter dengan menjelaskan mana tingkah laku yang baik, apa yang pantas, dan apa yang secara substansi mengandung kebaikan dan sebaliknya. Di dalam diri anak bangsa mengalir sifat-sifat luhur manusia, yang pada perkembangannya dirumuskan pendiri bangsa dalam Pancasila. Rumusan ini sejatinya merupakan sintesa nilai etika dan moral yang diangkat dari nilai-nilai luhur bangsa yang dikenal religius, berperikemanusiaan dan berkeadilan, serta mengutamakan persatuan dan demokrasi.

**7. Sebutkan sifat-sifat karakter bangsa Indonesia yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara?**

Karakter dapat dikembangkan dan bukan diturunkan secara genetik. Karakter adalah hasil pendidikan formal, informal dan non-formal yang sangat dibutuhkan, dan secara langsung dapat mewujudkan etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam mempelajari berbagai karakter bangsa Indonesia, maka kita semua lebih dahulu harus meyakini akan kebenaran Empat Konsensus Dasar yang berintikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Sepanjang masih ada negara dan bangsa Indonesia, maka Empat Konsensus Dasar wajib dipegang teguh dan dipatuhi oleh seluruh Warga negara Indonesia (WNI), serta dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh penyelenggara negara, baik di pusat maupun di daerah s/d tingkat Kelurahan/Desa yang merupakan unit terkecil penyelenggara pemerintahan. Dengan demikian, keyakinan akan kebenaran Empat Konsensus Dasar merupakan prasyarat untuk menjabarkan lebih lanjut sifat-sifat karakter bangsa Indonesia.



Sumber: <https://buzzerbeezz.files.wordpress.com/2012/11/scan10112.jpg>

**Gambar 3.1: Karakter Bangsa**

Ada setidaknya 45 (empat puluh lima) sifat-sifat karakter sesuai kelahiran NKRI tahun 1945, yang merupakan implementasi Nilai Praksis Pancasila (Lihat Bab II), dan dapat dikembangkan sebagai salah satu modal bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang maju dan tangguh sesuai nilai-nilai Pancasila, yang dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

### 1) **Bangga sebagai Bangsa Indonesia**

Bangsa dan Negara Indonesia dilahirkan berdasarkan Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Kita wajib mempelajari sejarah perjuangan bangsa, dimana para pendahulu kita telah mempertaruhkan jiwa dan raga, serta harta benda dan pengorbanan lainnya yang tidak ternilai harganya. Kita juga harus menyadari bahwa bangsa Indonesia amat majemuk yang memiliki berbagai suku, budaya, agama, adat istiadat, daerah dan berbagai identitas lainnya, serta hidup dalam wadah NKRI. Namun, kemajemukan dan perbedaan ini janganlah menjadi penghalang untuk membangun persaudaraan, kerukunan, dan harmonis di bumi pertiwi ini.

Oleh karena itu, diperlukan adanya kesadaran, pemahaman dan tekad bersatu sebagai bangsa Indonesia, serta memiliki tanggung jawab moral dan bangga untuk terus menjadikan Indonesia, dimana semua anak bangsa mendapatkan ketentraman, kedamaian dan harapan terhadap masa depan yang cerah, sehingga selalu bangga sebagai bangsa Indonesia yang hidup di wilayah NKRI yang luas dan subur, seperti ungkapan “Untaian Zamrud di Khatulistiwa” dan memiliki:

- a) Lagu Kebangsaan, yaitu Indonesia Raya;
- b) Bendera negara, yaitu Sang Merah Putih;
- c) Bahasa negara, yaitu Bahasa Indonesia;
- d) Lambang negara, yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Kita jangan pernah menjelek-jelekan bangsa sendiri, sekalipun masih ada hal yang belum sempurna yang dilakukan oleh

Negera/Pemerintah kepada rakyatnya, karena masih mengalami tantangan dan kekurangan sumber daya.

Ada ungkapan, “*mikul duwur, mendem jero*”, yang artinya apresiasi jasa baik para pejuang/pemimpin terdahulu yang kita hormati, serta tutupi kelemahan mereka. Menjelek-jelekan bangsa sendiri merupakan sebuah kebiasaan buruk yang menghambat kemajuan kita sebagai bangsa yang besar.

Kunci dari semua itu adalah persatuan, kekompakan dan kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Jiwa dan semangat semua ini adalah keharusan kita untuk bersatu dalam perbedaan sebagaimana tertuang dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, agar dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.



Sumber: <https://komangarya900089.wordpress.com/2010/08/16/edisi-merah-putih-bangga-jadi-orang-indonesia/>

**Gambar 3.2: Bangga Indonesia**

## 2) Gotong Royong

Budaya bangsa yang merupakan ciri khas sejak dahulu kala adalah gotong-royong, yaitu melakukan suatu kegiatan kerjasama yang saling tolong-menolong diantara sesama warga bangsa. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kegiatan gotong royong akan menimbulkan rasa kebersamaan, solidaritas, saling membantu, saling menghormati, dan saling menghargai untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Ini tidak saja dilakukan pada

lingkungan yang terkecil seperti keluarga, tetangga sekitar, tempat lingkungan yang terbatas seperti di sekolah maupun tempat bekerja, namun juga lingkungan yang lebih luas demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

### 3) **Religius**

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius, dimana nilai-nilai agama dipegang teguh oleh masyarakat. Enam agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindhu, Budha, dan Konhuchu, serta ajaran agama lainnya yang tumbuh. Disamping itu, negara juga mengakui keberadaan aliran kepercayaan yang ada sebelum berdirinya NKRI. Semua penganut agama dan penghayat aliran kepercayaan itu dapat berkembang dan hidup rukun sesuai Sila Pertama Pancasila, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sebagai bangsa yang religius, maka setiap warga negara harus beriman kepada Tuhan YME.

### 4) **Beradab**

Beradab berasal dari kata adab yaitu kehalusan dan kebaikan budi pekerti; kesopanan; akhlak. Beradab artinya mempunyai adab; mempunyai budi bahasa yg baik; berlaku sopan; telah maju tingkat kehidupan lahir batinnya. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang beradab dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia. Ini ditegaskan dalam Sila kedua Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”.

### 5) **Menjaga Persatuan**

Masyarakat Indonesia mengembangkan persatuan atas dasar sesanti *Bhinneka Tunggal Ika*, karena menyadari bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku/etnik, budaya, agama, dan daerah. Oleh karena itu, secara tegas tercantum dalam Sila Ketiga Pancasila, yaitu “Persatuan Indonesia”. Setiap pribadi hendaknya dapat mengembangkan cinta terhadap tanah air dan bangsa, serta kompak dan mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan. Kita harus



ingat akan ungkapan terkenal yaitu “bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh”.

## 6) Musyawarah Mufakat

Musyawarah adalah salah satu karakter utama bangsa Indonesia dan ini ditegaskan dalam Sila Ke Empat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Sejak dahulu, dikenal adanya Rembuk Desa yang merupakan forum untuk melakukan musyawarah mencapai mufakat, yaitu proses pembahasan suatu persoalan untuk mencapai keputusan bersama. Mufakat adalah kesepakatan yang dihasilkan setelah dilakukan proses pembahasan dan perundingan bersama. Jadi musyawarah mufakat merupakan proses membahas persoalan secara bersama, demi mencapai kesepakatan/konsensus bersama. Tidak boleh ada satu pihak yang merasa paling besar atau paling benar memaksakan kehendak kepada pihak lain, tanpa melalui penjelasan yang disertai argumentasi yang baik.

Dengan musyawarah mufakat diharapkan dua atau beberapa pihak yang berbeda pendapat, tidak perlu bertikai dan perlu ada solusi yang diterima semua pihak. Untuk itu, dalam proses musyawarah mufakat diperlukan kerendahan hati, keikhlasan diri dan kerjasama yang baik, untuk mencari solusi yang bermartabat, serta memberi manfaat bagi semua pihak demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

## 7) Demokratis

Semangat demokratis adalah jiwa masyarakat Indonesia dari dulu, dimana dalam setiap pengambilan keputusan senantiasa melibatkan semua pihak, melalui pembahasan bersama dan untuk kepentingan bersama. Didalam karakter demokratis terdapat ciri-ciri penghargaan terhadap perbedaan, tidak memaksakan kehendak, serta mengutamakan *win-win solution* yang mengutamakan konsensus atau musyawarah untuk memperoleh mufakat.

Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak, merupakan cara yang paling akhir dilakukan, apabila tidak ada titik temu berdasarkan kesepakatan atau konsensus dalam suatu kelompok masyarakat. Pentingnya kehidupan demokrasi dalam masyarakat, dapat pula menumbuhkan semangat kerukunan antar anggota masyarakat. Dengan demikian, kekeluargaan, kebersamaan, dan kebebasan mengemukakan pendapat secara demokratis akan tumbuh secara positif dengan memperhatikan kearifan lokal. Kita sudah mengenal proses demokrasi pemilihan Kepala Desa sejak awal kemerdekaan yang dipilih langsung oleh masyarakatnya di Desa.

Masyarakat dapat hidup tanpa rasa takut, tanpa tekanan, dan tanpa saling menakuti satu sama lain. Mereka akan hidup bebas menyuarkan pikiran dan isi hatinya, serta anggota masyarakat merasa senang jika hak-hak dan kebebasan mereka terjamin. Sebaliknya bila hak dan kebebasan tidak terjamin, maka berarti bahwa kehidupan demokrasi tidak ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, betapa pentingnya kehidupan demokrasi ditengah pergaulan yang beradab sekarang ini.

#### **8) Adil**

Adil artinya sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; sepatutnya; dan tidak sewenang-wenang. Sifat adil dicirikan dengan keberpihakan pada kebenaran, dimana seorang yang adil, tidak akan melindungi sesuatu yang tidak benar. Keadilan bersifat obyektif, sesuai obyeknya dan bukan dipengaruhi subjektivitas, misalnya karena tidak suka kepada seseorang. Adil juga mengandalkan logika dan menjunjung tinggi kebenaran.

Seorang pemimpin yang adil adalah pemimpin yang mampu memberi hukuman atau teguran bagi yang salah, tetapi juga siap memberi penghargaan/hadiah bagi yang berprestasi.

Sila Kelima Pancasila, yaitu, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Salah satunya diwujudkan dengan menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, guna memperkecil kesenjangan sosial ekonomi dan kerawanan sosial. Rakyat harus merasakan arti pembangunan yang berkeadilan, dengan memberi manfaat kesejahteraan lahir dan batin.

## 9) Toleransi

Toleransi yang berasal dari kata toleran, artinya saling menghargai dan saling menghormati atau biasa disebut tenggang rasa (*tepo seliro*). Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, dimana ada potensi konflik di tengah gesekan perbedaan. Untuk itu semangat dan karakter yang toleran menjadi kunci untuk dapat mewujudkan konsepsi “bersatu dalam keberagaman dan harmoni dalam perbedaan” yang diwujudkan dalam kerukunan antar umat beragama, suku, budaya dan lain-lain. Kewajiban kita sebagai bangsa untuk terus menerus tanpa henti memelihara sikap toleransi dan menghargai kemajemukan/*pluralisme*, dimanapun, dan kapanpun kita berada.



Sumber: <http://cahyalfc.blogspot.co.id/2012/07/kedamaian-itu-ada-ketika-kita-mau.html>

**Gambar 3.3: Persatuan dalam Kebhinnekaan**

## 10) Kerukunan

Kerukunan yang berasal dari kata rukun, artinya damai dan tenteram. Semangat kerukunan sudah hidup di masyarakat Indonesia sejak dulu, dan tampak pada tingginya harmonis ditengah perbedaan suku, agama, dan budaya. Bahkan sejak jaman Majapahit, masjid dan pura sudah dibangun berdampingan dan menunjukkan karakter kerukunan tersebut. Kerukunan menjadi salah modal dasar dalam pembangunan. Pentingnya menjaga kerukunan, terutama untuk mencegah terjadinya pertikaian dan/atau konflik sosial di tengah kehidupan masyarakat.

## 11) Pantang Menyerah

Para pejuang kemerdekaan telah menunjukkan betapa kita memiliki karakter pantang menyerah dan patriotisme, dimana ditengah keterbatasan melawan penjajah kita tetap berani, dan akhirnya berhasil memerdekakan diri. Para pahlawan/pejuang bangsa, bahkan tetap mengobarkan perjuangan walaupun dari balik penjara ditengah intimidasi dan ancaman. Kegigihan, keuletan dan semangat pantang menyerah, patut diwariskan kepada generasi muda, karena akan menjadi modal dasar untuk menjadikan Indonesia besar dan disegani dunia. Generasi muda dengan semangat pantang menyerah, akan dapat mewujudkan cita-citanya, atau mimpi seseorang akan terwujud menjadi kenyataan dengan cara kerja keras yang pantang menyerah sesuai kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya.

## 12) Rela Berkorban

Karakter rela berkorban lahir dari kecintaan terhadap bangsa dan negara. Warga yang rela berkorban dapat disebut patriotik, karena mengutamakan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Setiap orang pasti bisa membantu orang lain dengan kemampuannya masing-masing. Dalam hal ini adalah niat dan kesediaan untuk mengulurkan tangan kepada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang sedang ditimpa

musibah, misalnya bencana alam. Karakter rela berkorban sangat nyata dicontohkan oleh para pahlawan/pejuang bangsa yang rela membela negara, mengorbankan pikiran, tenaga, harta-benda dan, bahkan nyawanya demi nusa dan bangsa. Karakter ini bisa menjadi motivasi yang kuat bagi generasi muda dalam memajukan bangsa ditengah persaingan global.

### **13) Kerja Keras**

Kerja keras adalah lawan kata dari sifat pemalas. Semangat kerja keras sangat penting dalam mempercepat kesejahteraan rakyat. Tidak ada pribadi/perorangan atau negaranya bisa sejahtera, apabila tidak dilandasi semangat kerja keras dan ketekunan seperti masyarakat di negara maju, antara lain Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Dalam aktivitas sehari-hari, diwujudkan dengan mengejar prestasi baik di sekolah maupun tempat kerja.

Seseorang yang mengejar prestasi tidak pernah menghindarkan masalah dan bahkan apabila melihat masalah, justru sebagai tantangan agar membuat dirinya semakin matang dari waktu ke waktu. Orang yang bekerja keras adalah orang selalu melakukan evaluasi diri, terhadap apa yang sudah dicapai dan yang belum dicapai.

Ada ungkapan dalam militer “lebih baik mandi keringat dalam latihan, daripada mandi darah di medan pertempuran”. Ini menunjukkan bahwa kerja keras dalam latihan sangat penting, daripada mati konyol di pertempuran karena tidak terlatih. Ada banyak cara kerja keras yang harus kita biasakan, seperti kerja keras mencari nafkah, kerja keras dalam mencari informasi dan kerja keras dalam menghasilkan sebuah karya. Dengan cara ini kita harus bekerja keras agar menjadi bangsa yang unggul dan maju pada abad ke-21.

### **14) Menghormati Orang yang Lebih Tua**

Dalam agama menghormati orang yang lebih tua adalah wajib hukumnya. Hal ini juga sudah dipraktekkan oleh masyarakat kita sejak dahulu yang merupakan budaya bangsa. Sekarang

ini kita menghadapi tantangan karena pengaruh negatif globalisasi, yang cenderung kurang memperhatikan hal tersebut. Oleh karena itu, kebiasaan menghormati orang yang lebih tua, wajib ditanamkan sejak dini yang dimulai dengan menghormati orang tua, guru dan pemimpin. Itulah sebabnya, ajaran budi pekerti paling awal adalah pelajaran untuk bersikap menghormati orang lebih tua dan sopan santun. Norma sopan santun sangat penting untuk diterapkan, terutama dalam kehidupan masyarakat, karena norma ini sangat erat kaitannya terhadap masyarakat. Misalnya seseorang berpakaian yang tidak memperhatikan Norma Kesopanan. Sekali saja ada pelanggaran terhadap Norma Kesopanan, pelanggar akan mendapat sanksi dari masyarakat berupa cemoohan, celaan, atau dikucilkan dari pergaulan.

### **15) Cinta Damai**

Damai berarti tidak saling bermusuhan dan berupaya merajut persahabatan dengan semua pihak. Dalam menciptakan kondisi damai adalah dengan cara membuang rasa benci yang berujung permusuhan kepada siapapun. Sebagaimana kita ketahui bersama, bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai suku/etnik, budaya agama, sehingga ada potensi rawan konflik, apabila tidak dikelola dengan baik dengan cara-cara yang damai dan kekeluargaan.

Apabila terjadi konflik maka timbul ungkapan “menang jadi arang dan kalah jadi debu”, dimana hal ini kita pernah alami pada konflik di beberapa daerah pada awal reformasi, seperti di Maluku, Poso dan Sampit. Konflik seharusnya dapat diselesaikan bukan dengan cara kekerasan, melainkan melalui cara-cara damai dengan perundingan dan musyawarah. Oleh karena itu, cinta damai harus diiringi dengan sifat sabar, atau dapat menahan diri (dengan pendekatan budaya dan agama) agar tidak melakukan tindakan kekerasan/anarki.

Kekerasan bukanlah lambang keberanian. Kekerasan adalah lambang keterbelakangan yang mengantarkan orang pada

kekerasan. Kita harus dapat menggunakan kecerdasan dan akal budi kita untuk menyelesaikan konflik dengan cara-cara bermartabat dan terhormat. Apabila terjadi konflik yang bernuansa kekerasan, maka masyarakat berada dalam suasana yang ketakutan dan tidak aman. Kehancuran terjadi pada fasilitas umum dan harta penduduk, serta aktivitas masyarakat menjadi terganggu. Anak-anak yang tidak bersalah tidak dapat bersekolah, dan pembangunan menjadi terhambat. Kondisi damai harus dipelihara dan menjadi modal dasar dalam membangun bangsa, dan tidak ada kemajuan bangsa tanpa ada kondisi damai. Dilain pihak, dalam hubungan antar bangsa dan negara, kita perlu memelihara perdamaian dan bekerjasama dalam era globalisasi. Apabila ingin damai, kita juga harus waspada untuk siap bela negara dan berperang melawan negara lain dengan memiliki peralatan militer dan SDM yang tangguh, agar tidak dilecehkan dan diinvasi oleh negara/bangsa lain dalam persaingan regional dan global.

#### **16) Rasa Malu**

Masyarakat Indonesia sejak dahulu kala berpegang teguh kepada pranata adat dan budaya berdasarkan kearifan lokal yang sangat dipatuhi terhadap norma-norma yang berlaku, sehingga mempunyai rasa malu apabila melanggarnya. Apabila dilanggar, maka dia harus menerima sanksi hukuman dari lingkungannya, misalnya masyarakat pada Desa Adat/Banjar di Bali. Oleh karena itu, perlu menumbuhkan kembangkan sifat malu, yaitu malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral, agama, dan budaya bangsa.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diwujudkan dengan kepatuhan pranata hukum sesuai peraturan perundang-undangan agar ada keteraturan dan tidak dikucilkan dari lingkungannya. Saat ini masih sering terjadi ada orang yang tidak merasa malu karena melakukan perbuatan korupsi atau perbuatan tercela lainnya. Bahkan ada tindakannya yang melanggar Norma Kesopanan saja sudah

tidak disadari lagi, karena dianggap tidak melanggar peraturan perundang-undangan, misalnya memasang musik dengan volume yang keras di malam hari tanpa merasa bersalah mengganggu ketenangan lingkungan tetangganya. Sifat malu ini penting dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan bagian Etika Berbangsa dan Bernegara.

### **17) Menjaga Kehormatan (martabat)**

Dalam kehidupan sehari-hari kita patut menjaga kehormatan atau martabat diri dalam berpikir, bersikap dan bertindak yang terkait dengan Akhlak seseorang agar jangan melakukan perbuatan yang tercela, hina dan tidak terpuji yang sangat bertentangan dengan nilai, norma-norma dan ajaran agama. Seseorang harus menjaga kehormatan diri pribadi, keluarga dan kelompok, serta nama sekolah atau instansi tempat dia bekerja. Bagi seorang anggota militer bahwa kehormatan adalah hal yang sangat penting seperti ungkapan “lebih baik pulang nama (mati), daripada kalah dalam pertempuran”. Demikian pula, apabila ada tindakan seorang oknum suatu instansi yang melanggar hukum, maka dapat mencoreng nama baik instansinya. Kita harus ingat seperti pepatah, *“Karena Nila Setitik, maka Rusak Susu Sebelanga”*.

### **18) Berpikir Positif**

Berpikir positif sangat penting karena pikiranlah yang menggerakkan ucapan dan tindakan, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Pikiran yang positif akan membuat kita berbicara dan berperilaku positif juga. Berpikir positif adalah kebiasaan yang bisa dilatih dan perlu dimulai dari sejak anak-anak hingga dewasa, sehingga dapat akan membuahkan hasil karya yang baik, tidak saja untuk kepentingan pribadi dan keluarga, juga untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Kita tidak boleh berpikir negatif yang hanya mencari-cari keburukan orang lain dan tentu saja akhirnya kita akan menemukannya, karena pada dasarnya manusia adalah



mahluk yang tidak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan Sang Pencipta.

Oleh sebab itu, mencari kelemahan orang lain merupakan tindakan yang sia-sia dan bukan karakter yang terpuji. Kitapun akan lebih bahagia bila mampu dan terbiasa melihat kebaikan orang lain daripada keburukannya.

### **19) Tidak Merasa Rendah Diri**

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, maka sebagai warga bangsa tidak perlu merasa rendah diri atau minder ditengah pergaulan dunia. Banyak sekali alasan untuk tidak rendah diri, karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terletak di posisi yang sangat strategis dengan sumber daya alam yang sangat berlimpah dan kaya akan budayanya.

Untuk itu, kita harus berpikir positif agar kita mampu melihat kelebihan bangsa sendiri dibandingkan bangsa lain. Demikian pula, dalam kehidupan sehari-hari bahwa mungkin secara fisik kita tidak seberuntung orang lain, namun mungkin kita mempunyai kepribadian yang disenangi banyak orang. Pada prinsipnya, selalu ada sisi positif dari setiap orang termasuk kita. Sisi positif itulah yang perlu dikembangkan sebagai penangkal munculnya perasaan rendah diri didalam pergaulan sehari-hari atau antar bangsa.

### **20) Rendah hati**

Rendah hati sangat berbeda dengan rendah diri, karena rendah hati adalah kebesaran jiwa pribadi sehingga terpancar dari sikap keramahan, keterbukaan, dan kesantunannya seperti peribahasa *“bagaikan ilmu padi, makin berisi makin merunduk”*. Apabila dia seorang yang hebat, maka tidak mau memamerkan kehebatannya dihadapan orang banyak.

Rendah hati juga menunjukkan rasa syukur atas karunia Tuhan, karena kita menyadari bahwa kita bukanlah siapa siapa

apabila dibandingkan kekuasaan Allah SWT. Ingatlah ungkapan “*Diatas Langit Masih Ada Langit*”.

### **21) Santun**

Santun berarti halus dan baik budi bahasa dan tingkah lakunya, sabar dan tenang; sopan; penuh belas kasihan; dan suka menolong. Kesantunan menjadi penting dan diperlukan dalam pergaulan masyarakat Indonesia. Santun juga diartikan mampu bertutur kata yang baik, dan tidak menyakitkan lawan bicaranya. Ucapan terima kasih apabila menerima sebuah kebaikan atau menyebutkan minta tolong apabila meminta bantuan kepada pihak lain adalah ungkapan sikap dan ucapan daripada santun tersebut.

Pada dasarnya santun dapat terbangun apabila kita memiliki kerendahan hati sebagaimana yang diuraikan sebelumnya. Sebagai warga negara yang baik, peliharalah kesantunan terhadap siapapun, terutama terhadap orang tua, guru, dan juga pemimpin/atasan maupun orang yang usianya lebih tua.

### **22) Ramah**

Ramah, yaitu baik hati dan menarik budi bahasanya; manis tutur kata dan sikapnya; suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan. Bangsa Indonesia dikenal dan diakui dunia sebagai bangsa yang ramah, bangsa yang murah senyum. Buah dari karakter ramah adalah terciptanya suasana yang cair dalam berkomunikasi dan akan disenangi semua pihak dalam pergaulan diantara sesama teman sekolah, mitra kerja dan pergaulan antar bangsa.

### **23) Jujur**

Jujur artinya lurus hati, tidak berbohong, dan syarat awal terwujudnya integritas; tidak curang (mengikuti aturan yang berlaku); tulus, serta ikhlas. Dalam konteks ke-Indonesia-an sekarang bahwa jujur sangat bersinggungan erat dengan maraknya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Indonesia. Bangsa Indonesia akan menjadi besar apabila korupsi bisa

diberantas dan dikikis habis, karena menjadi penghambat pembangunan. Oleh karena itu, mulailah dari diri sendiri, kemudian keluarga, lingkungan kerja dan terus kepada lingkup yang lebih luas dan dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkenal dengan slogannya bahwa *“Berani Jujur, Hebat”*.

#### **24) Bersahaja (Sederhana)**

Bersahaja artinya sifat, pembawaan dan tingkah laku yang sederhana; tidak berlebih-lebihan. Setiap orang, khususnya pemimpin harus memiliki sifat dan pembawaan yang tidak mementingkan diri sendiri dengan sikap yang sederhana. Kesederhanaan tersebut juga diwujudkan dalam sikap dan tindakan yang proporsional, artinya apabila dia orang mampu dalam bidang ekonomi, namun tidak memamerkan kekayaannya dan juga memiliki kepedulian sosial membantu orang yang kurang mampu. Kesederhanaan tersebut dapat diwujudkan apabila seseorang melakukan cara hidup dengan hemat, yakni membelanjakan secukupnya dan apabila membutuhkan sesuai kebutuhannya yang pantas dan tidak *“tamak/serakah”*.

#### **25) Disiplin**

Disiplin yaitu ketaatan pada aturan. Disiplin sangat erat dengan keteraturan terutama berkaitan dengan waktu. Untuk dapat berdisiplin maka harus siap mengorbankan kesenangan karena harus menjalankan tanggung jawab atau kewajiban. Dalam organisasi diwujudkan dengan kesadaran pengabdianya mentaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku. Bagi anggota militer, dibutuhkan sikap disiplin yang sangat tinggi agar menjadi profesional dan syarat dasar untuk mewujudkan etos kerja.

Buah kedisiplinan adalah keteraturan yang dibutuhkan dalam hidup bermasyarakat sebagai sebuah bangsa besar. Contoh yang paling sederhana, seseorang dalam memenuhi jam

kerjanya, masuk jam 7.30 pagi di kehidupan kota Jakarta, maka seseorang yang tinggal di Bekasi atau Tangerang, harus berangkat setidaknya jam 5 pagi agar tiba tepat waktu.

## **26) Setia (Loyal dan Patuh)**

Setia adalah teguh atau taat pada janji atau komitmen yang dibuat maupun pendiriannya. Masyarakat Indonesia dikenal memiliki kesetiaan yang tinggi, misalnya pada tokoh yang dihormati serta pada pemimpin. Kita wajib setia kepada Empat Konsensus Dasar, kepada negara dan bangsa, serta kepada pemimpin atau guru atau kepada atasan di tempat kita bekerja yang ditunjukkan dengan loyalitas dan kepatuhan yang tinggi sesuai peraturan perundang-undangan. Kesetiaan akan berbuah kebaikan dan tidak akan pernah sia-sia.

Kesetiaan seorang anggota dalam suatu organisasi, ditunjukkan keatas, kesamping dan kebawah, sehingga akan tercapai "*l'esprit de corps*" yang kuat, sehingga tidak akan ada ucapan dan tindakan yang merugikan nama baik kelompok atau organisasinya.

Sebagai anak bangsa, kita wajib memiliki kesetiaan kepada bangsa dan negara Indonesia, serta wajib membela bangsa dan negara apabila membutuhkannya. Dalam salah satu semboyan militer ada ungkapan, "setia tanpa batas kepada bangsa dan negara"

Dalam konteks organisasi atau pekerjaan dimanapun, kesetiaan tentu akan menjadi faktor penilaian dari atasan kepada bawahan, dan bukan berarti bahwa kesetiaan hanya milik bawahan. Sebagai atasan juga dituntut kesetiaan pada kelompoknya. Setiap menghadapi kesulitan, seorang pemimpin yang baik tidak akan meninggalkan bawahannya, seperti juga bawahan tidak akan meninggalkan atasan di masa-masa sulit.

## **27) Sportif**

Sportif adalah sikap ksatria dalam menghadapi persaingan dan siap menerima apapun hasilnya, walaupun kadangkala tidak

sesuai dengan harapan. Kata sportif berasal dari kata *sport* (olahraga) yang memang mengenal persaingan dan kesiapan menang dan kalah. Sikap sportif artinya siap menang dan sekaligus siap kalah. Jika menang, anggaplah kemenangan itu sebagai amanah dan tanggung jawab serta tidak menjadi arogan dan merendahkan yang kalah. Hal ini akan lebih indah lagi, apabila yang menang membuka pintunya lebar-lebar untuk mengajak yang kalah untuk kembali bekerjasama. Kalau yang kalah, jangan marah apalagi bertindak anarkis.

Kita harus dapat mengakui kekalahan atau kegagalan dengan kebesaran hati. Berikan ucapan selamat kepada pemenang. Kegagalan atau kekalahan bukanlah akhir dari segalanya. Dengan kerja keras maka kita akan bangkit kembali dari kekalahan untuk meraih keberhasilan pada saatnya nanti.

Dalam dunia politik misalnya, sikap sportif bisa dilakukan dengan siap menang dan mengakui kehebatan lawannya apabila dia kalah. Inilah salah satu karakter modal dasar untuk membangun “Demokrasi yang Berkeadaban” melalui Pemilu 2014 yang merupakan bagian akhir konsolidasi demokrasi yang dibangun sejak memasuki Era Reformasi Tahun 1998.

## **28) Konsisten (Satu Kata dan Perbuatan)**

Konsisten artinya tetap (tidak berubah-ubah); taat; selaras; sesuai, dalam bahasa yang sederhana yaitu kesatuan kata dan perbuatan yang merupakan buah dari keteguhan dalam memegang janji dan komitmen (tidak munafik). Kesatuan kata dan perbuatan menjadi syarat mutlak bagi seorang pemimpin, itulah ungkapan yang tepat. Pemimpin yang demikian, maka akan dapat diteladani oleh para pengikutnya.

Sikap pemimpin yang baik berpedoman seperti yang diperkenalkan oleh Ki Hadjar Dewantoro (tokoh pendidikan), yaitu:

- a. ***Ing Ngarso Sung Tulodo***, artinya seseorang pemimpin atau tokoh masyarakat memiliki karakter di depan memberi keteladanan kepada pengikutnya.

- b. **Ing Madyo Mangun Karso**, artinya seorang pemimpin dapat membimbing dan mendorong dengan prakarsa dan idenya kepada orang yang dipimpinnya.
- c. **Tut Wuri Handayani**, artinya seorang pemimpin harus senantiasa memberikan dukungan dan ikut dari belakang kepada para pengikutnya agar bisa tampil ke depan yang siap melanjutkan kepemimpinannya.

Jagalah selalu agar perbuatan sejalan dengan perkataan dan di pihak lain, katakanlah apa yang telah kita lakukan. Dengan demikian, orang lain mengetahui apa saja yang kita kerjakan untuk mereka. Seringkali, persepsi orang kepada kita sebagai perseorangan, anggota kelompok, atau pejabat dirugikan bukan karena kita melakukan perbuatan yang baik, tetapi karena mereka tidak tahu apa yang sudah kita kerjakan. Oleh karena itu, beri informasi kepada masyarakat hal-hal yang baik akan tindakan positif yang telah kita lakukan bagi kepentingan mereka. Orang yang tidak konsisten, akan sulit maju, karena tidak pernah tetap pendiriannya, sehingga akan sulit untuk dipercaya dan tidak bisa diteladani. Untuk itu, generasi muda agar mulai belajar konsisten sejak dini, untuk bekal menjadi calon pemimpin.

## 29) Cinta Lingkungan

Bangsa Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa, sehingga harus dijaga kelestariannya agar dapat bermanfaat bagi generasi mendatang. Namun, disisi lain dianugerahi potensi bencana alam seperti gempa bumi, longsor, dan banjir yang disebabkan sebagian besar oleh perilaku manusia, misalnya penggundulan hutan.

Indonesia juga terletak dalam *pacific ring of fire* (cincin api pacifik) yang merupakan jalur rangkaian gunung api aktif dunia dan Indonesia memiliki sekitar 240 gunung berapi, 70 diantaranya masih aktif. Kondisi ini menjadikan 28 dari 34 Provinsi merupakan daerah rawan gempa dan tsunami, serta letusan gunung berapi/erupsi.

Untuk dapat mengelola lingkungan hidup dengan baik, maka diperlukan karakter kecintaan terhadap lingkungan. Mencintai lingkungan harus dimulai dari hal-hal nyata dan sederhana seperti menanam pohon di halaman rumah sendiri, membuang sampah ditempatnya, dan menghemat pemakaian air, serta menjaga lingkungan sekitarnya agar bersih dan asri.

### **30) Cinta Seni dan Budaya**

Seni dan budaya adalah bagian hidup umat manusia yang turut mewarnai peradaban bangsa termasuk di Indonesia. Tingginya peradaban seni dan budaya bangsa Indonesia tampak dari karya seni yang sudah diakui dunia seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, tari-tarian daerah, dan seni budaya lainnya. Hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya bangsa kita telah memiliki peradaban yang tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain.

Kita harus memandang bahwa bangsa kita dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah bersama bangsa lain. Kita memiliki banyak hal yang baik, yang belum tentu dimiliki bangsa lain.

Oleh karena itu, kita perlu ikut serta melestarikan kebudayaan daerah dan mengembangkan kesenian daerah. Alangkah keringnya hidup kita apabila kita menjauhi seni budaya yang perannya besar sekali untuk menghaluskan perasaan kita dan akan timbul rasa syukur atas kebesaran Tuhan YME.

Logika, etika, dan estetika harus berjalan seimbang dalam kehidupan. Tidak semua persoalan hidup dapat diselesaikan dengan logika atau etika saja. Seringkali kita menyelesaikan persoalan hidup kita melalui estetika, dengan sejenak menikmati keindahan seni dan budaya yang menyegarkan kita kembali dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan sehari-hari.

### **31) Berani**

Berani berkorelasi dengan pepatah "*Berani karena Benar dan Takut karena Salah*". Berani artinya juga mempunyai hati yang

mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam mengambil keputusan dan tindakan yang akan menimbulkan bahaya dan kesulitan bagi dirinya sendiri, dengan memperhitungkan resiko yang timbul.

Bangsa Indonesia berani melawan penjajah dengan resiko mengorbankan nyawa, harta benda dan lain-lain, karena ingin bangkit dan sejajar seperti bangsa lain untuk menikmati kebebasan dan kesejahteraan. Sifat keberanian wajib dimiliki oleh calon pemimpin Bangsa, agar dia dapat memperjuangkan kepentingan bangsanya. Dalam kondisi sekarang, sering juga disebut bahwa salah satu syarat kepemimpinan, seseorang harus punya “*nyali (keberanian)*” dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan bangsanya. Bagi anggota militer pada umumnya, mereka juga harus mempunyai sifat yang berani, karena dipersiapkan untuk menjadi seorang “petarung” (*Fighter*) untuk membela dan menjaga kedaulatan NKRI.

### **32) Siap Bersaing**

Bangsa Indonesia hidup di lingkungan global dengan tingkat persaingan yang makin tinggi. Untuk itu karakter siap bersaing menjadi sangat penting tentunya dengan cara yang *fair* atau persaingan yang sehat, sesuai aturan yang berlaku, serta dalam suasana yang menyerupai semangat kekeluargaan. Semua orang pada dasarnya tentu ingin menang, tetapi kita harus paham bahwa kekalahan sebenarnya juga dapat memperkuat diri kita. Jauh lebih terhormat mengalami kekalahan, tetapi sempat berjuang pada suatu kompetisi, daripada kalah karena tidak pernah ikut bertanding.

Persaingan itu bukan permusuhan dan bukanlah sosok musuh yang harus dihancurkan. Pesaing dan persaingan harus dilihat dalam konteks sebagai tantangan yang mampu membuat kita semakin kuat dan tahan banting. Oleh karena itu, bersainglah secara sportif dan terhormat.

### **33) Amanah**

Amanah artinya orang yang dapat dipercaya dan tidak pernah berkhianat atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.



Apabila dia menjadi pemimpin di masyarakatnya, maka dia akan memusatkan perhatian untuk memajukan kesejahteraan masyarakatnya dan tidak akan menghinakan masyarakat yang dipimpinnya. Apabila kita tidak amanah, maka akan sulit untuk dipercaya dalam memperoleh kepercayaan dari orang lain dalam melaksanakan tugas yang diembannya. Sifat jujur adalah hal yang melekat harus dimiliki seseorang untuk menjadi orang yang dipercaya dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

### **34) Selalu Mau Belajar**

Bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu mau belajar, salah satunya belajar dari kesalahan masa lalu, sehingga tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Belajar adalah untuk memperoleh pendidikan baik melalui pendidikan formal, informal dan non formal agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Cara paling mudah untuk belajar adalah dengan bertanya kepada orang yang lebih pandai, terlepas apakah dia lebih muda atau lebih tua. Kita juga harus senantiasa membiasakan diri untuk selalu rajin membaca buku-buku pelajaran dan ilmu pengetahuan. Pada dasarnya belajar dilakukan seumur hidup dan generasi yang selalu mau belajar seperti negara maju, maka dia akan menjadi bangsa unggul dalam percaturan globalisasi.

### **35) Terbuka**

Budaya masyarakat Indonesia pada umumnya adalah masyarakat yang terbuka terhadap pengaruh budaya lain. Walaupun terbuka, budaya Indonesia juga memiliki ketahanan yang cukup tinggi, sehingga akulturasi budaya yang terjadi biasanya berdampak positif, baik antara sesama budaya pribumi, maupun dengan non-pribumi, dan tidak saling merugikan dengan memperhatikan ungkapan "*Dimana Bumi Dipijak, Di situ Langit Di Junjung*". Oleh karena itu, tidak dibenarkan ada kelompok masyarakat yang bersifat eksklusif, tertutup, dan tidak berkomunikasi dengan lingkungan

masyarakat sekitarnya yang dapat menyuburkan bibit potensi konflik sosial.

Sejalan dengan perkembangan globalisasi akan masuknya nilai-nilai budaya asing, maka hal-hal yang bertentangan dengan budaya kita harus ditolak seperti budaya Narkoba, pornografi, seks bebas, dan lain-lain. Sedangkan yang dapat memperkuat kebudayaan dan nilai-nilai demokrasi seperti penghormatan HAM dan kesetaraan gender dapat diakomodasikan di Indonesia.

### **36) Riang Gembira**

Di dalam melaksanakan tugas selalu dikerjakan dengan hati yang riang dan gembira penuh kebanggaan, karena pada diri seseorang sudah tertanam rasa optimisme dan keyakinan/kepercayaan atas kemampuan diri sendiri untuk melaksanakan setiap tugas dengan sebaik-baiknya, tidak mengeluh, dan pantang menyerah terhadap segala kesulitan yang dihadapi.

Sebaliknya, apabila hati bersedih dan mengeluh terus pasti menjadi “*galau*”, maka tugas yang diemban atas perintah pimpinan/atasan, pasti akan gagal dan tidak akan tercapai target yang ditetapkan.

### **37) Kreatif**

Kreatif yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Kreatifitas berasal dari ide baru yang muncul dan hasilnya dapat berupa penemuan baru, karya seni, maupun produk-produk lainnya.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang amat terkenal kreatifitasnya terutama dalam berkesenian. Kita punya banyak sekali karya budaya, baik seni tradisional, modern, dan kontemporer. Melalui kreatifitas yang baik akan dapat terwujud produk-produk unggulan dalam negeri sebagaimana yang dikembangkan dalam bentuk industri ekonomi kreatif yang

memperbesar lapangan kerja dan menghasilkan devisa negara.

### **38) Mandiri**

Mandiri artinya sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam melaksanakan kewajiban dan menyelesaikan tugas yang diembannya. Kemandirian seseorang mencerminkan kedewasaannya untuk berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri, tanpa tergantung kepada pihak lain. Kemandirian dalam konteks kebangsaan, maka bangsa Indonesia akan mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya yang menjadi modal awal menjadi bangsa yang besar, seperti pendidikan dan kesehatan, maupun sandang (pakaian), papan (perumahan) dan pangan (makanan pokok) maupun infrastruktur dan ekonomi kerakyatan. Sedangkan bantuan dan pinjaman dari luar negeri, hanya bersifat pelengkap untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan agar tercapai tujuan nasional.

### **39) Tanggung Jawab**

Tanggung jawab yaitu sikap dan perilaku seseorang kesatria dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan dan bersedia memikul akibat perbuatannya, baik terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Lawan kata tanggung jawab adalah orang pengecut, yang biasa dikenal dengan ungkapan "*Lempar Batu Sembunyi Tangan*".

Seorang pemimpin yang baik, apabila dia melakukan kesalahan mendasar karena keputusannya yang merugikan masyarakat, bangsa dan negara, maka dia perlu mengundurkan diri untuk memenuhi rasa tanggung jawabnya.

Tanggung jawab merupakan salah satu sifat kepemimpinan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai modal membangun bangsa dan negara agar dapat lebih maju, berkeadilan, dan lebih sejahtera.

#### **40) Peduli**

Sikap peduli adalah sikap keterpanggilan pribadi seseorang untuk membantu mereka yang lemah, miskin, membantu mengatasi penderitaan, dan kesulitan yang dihadapi orang lain. Orang-orang peduli adalah orang-orang yang tidak bisa tinggal diam menyaksikan penderitaan orang lain dan pro aktif dalam mengatasi masalah-masalah di masyarakat dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus berupaya untuk memberi solusi dan membantu terhadap persoalan masyarakat sesuai kemampuan kita.

#### **41) Ikhlas**

Ikhlas adalah wujud kepasrahan dan ketulusan hati. Ikhlas ditunjukkan dengan sikap tanpa pamrih untuk memperoleh imbalan atau keuntungan langsung pada diri seseorang. Dalam semua ajaran agama bahwa keikhlasan adalah hal yang wajib dilakukan, terutama jika membantu orang lain agar mendapat kebaikan tidak saja di dunia, namun juga di akherat. Keikhlasan menentukan nilai amal kita dan mencegah dari perbuatan yang tercela. Kita perlu menanamkan sejak dini agar perbuatan dan tindakan yang ikhlas atau tulus hati kepada bangsa dan negara, mengingat sangat dibutuhkan untuk membangun menjadi bangsa yang besar.

#### **42) Kesetiakawanan Sosial (Solidaritas Sosial)**

Kesetiakawanan sosial (solidaritas sosial) artinya nilai-nilai dan semangat kepedulian sosial untuk membantu orang lain yang membutuhkan atas dasar empati dan kasih sayang. Kesetiakawanan sosial yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk menyelesaikan berbagai persoalan masalah sosial yang dihadapi, seperti kesenjangan sosial, kecemburuan sosial, dan kerawanan sosial. Oleh karena itu, setiap pribadi perlu memiliki empati kepada orang lain yang mengalami bencana, dan/atau kemiskinan.

Nilai-nilai kesetiakawanan sosial telah tumbuh dalam masyarakat sejak lama dan tidak terlepas dengan peristiwa sejarah bersatunya seluruh lapisan masyarakat dalam mempertahankan kedaulatan negara, yaitu pada tanggal 20 Desember 1948, sehari setelah tentara Kolonial Belanda menyerbu dan menduduki Ibukota negara yang pada saat itu di Yogyakarta.

Setiap tanggal 20 Desember selalu diperingati sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN) sebagai rasa syukur dan hormat atas keberhasilan seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam menghadapi ancaman bangsa lain yang ingin menjajah kembali bangsa kita. Upaya tersebut sekaligus untuk mengenang, menghayati, dan meneladani semangat persatuan, kesatuan, kegotong royongan, dan kekeluargaan rakyat Indonesia yang secara bahu membahu mempertahankan kedaulatan bangsa.

Kesetiakawanan Sosial merupakan salah satu kunci bagi perekat kesatuan bangsa, sebab rasa senasib sepenanggungan yang dialami rakyatnya akan menguatkan solidaritas sosial dan ikatan kebangsaan, sehingga bangsa Indonesia dapat terus membangun untuk kemajuan rakyatnya.

#### **43) Senantiasa Menjaga Kesehatan**

Masyarakat Indonesia juga harus memiliki karakter menjaga kesehatan. Dengan kesehatan yang prima, masyarakat dapat meningkatkan pendidikannya, bekerja mencari nafkah dan meningkatkan kesejahteraannya. Kita pernah memiliki semboyan "*men sana in corpore sano*", yang artinya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat.

Dalam arti yang luas, jika masyarakatnya sehat, maka mengurangi beban negara dan menjadi produktif untuk menghasilkan karya besar, serta akan muncul generasi yang unggul dan memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang dibutuhkan dalam mewujudkan tujuan nasional.

#### 44) Menonjolkan Kewajiban daripada Hak

Setiap orang pada dasarnya mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Apabila kita ingin berbuat yang terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara, maka hendaknya lebih menonjolkan kewajiban daripada hak agar dapat memberi kontribusi bagi kemajuan bangsanya.

Mendahulukan kewajiban berarti menyadari akan tanggung jawab yang diberikan dan berbuat sesuatu dengan keikhlasan, serta tanpa pamrih dan tidak menuntut kepada negaranya. Sedangkan apabila kita hanya menuntut hak semata, maka akan menjadi orang yang tidak mau bekerja keras, tidak mau berkorban, dan cenderung egois (memikirkan diri sendiri) yang menghambat terwujudnya pembangunan.

#### 45) Kerjasama

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia harus berinteraksi dan berkomunikasi manusia lain dan dengan lingkungannya, agar dapat saling memperoleh manfaat yang positif. Kerjasama adalah perwujudan interaksi sesama manusia maupun kelompok agar dapat memperoleh keuntungan pada masing-masing pihak.

Kerjasama adalah bagian dari aktualisasi diri manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Kerjasama antar kelompok masyarakat melalui tukar pengalaman, pengetahuan dan mengembangkan jaringan kerja (*network*) akan menghasilkan sesuatu yang lebih optimal. Hal ini akan bisa diwujudkan untuk bekerja sama dengan bangsa lain, atas dasar saling menghormati dan menguntungkan dalam era globalisasi.

Modal sifat-sifat karakter bangsa Indonesia sebanyak 45 (empat puluh lima) buah yang diuraikan diatas, apabila dapat dikembangkan secara simultan dan komprehensif melalui strategi yang tepat, maka setidaknya akan menjadi orang yang mempunyai karakter kuat, yaitu memiliki akhlak, moral dan budi pekerti yang

baik, serta didukung pengetahuan (*knowledge*) dan berkecakupan (*skill*) di era globalisasi.

Modal tersebut berpotensi menjadi calon pemimpin di masa depan untuk membangun bangsa Indonesia yang unggul dan sejahtera dalam mewujudkan “Visi Indonesia 2020” .







## B A B IV

**SEMBOYAN “BHINNEKA TUNGGAL IKA”  
YANG BERARTI BERBEDA-BEDA, NAMUN  
TETAP SATU;  
DIIMPLEMENTASIKAN UNTUK MENJAGA  
PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA  
DENGAN MEMPERKUAT KOMITMEN  
“(SUMPAH PEMUDA)”  
SATU TANAH AIR, TANAH AIR INDONESIA,  
SATU BANGSA, BANGSA INDONESIA,  
MENJUNJUNG BAHASA PERSATUAN,  
BAHASA INDONESIA.**

**KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**



## BAB IV

### PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

#### 1. Mengapa diperlukan Pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa?

Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, adalah bahwa atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, NKRI yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 mempunyai ciri khas, yaitu kebhinnekaan suku, kebudayaan, dan agama yang menghuni dan tersebar di belasan ribu pulau dalam wilayah Nusantara yang sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan disatukan oleh kesadaran, semangat dan komitmen/tekad kebangsaan: satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan, yaitu Indonesia, serta dilandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa.

Namun demikian, harus disadari bahwa saat ini nilai-nilai Pancasila cenderung terpinggirkan dan mengakibatkan berbagai persoalan yang membawa ancaman bangsa, seperti timbulnya konflik antar dan/atau internal agama, merebaknya penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan masalah, pudarnya semangat gotong royong, toleransi dan kerukunan masyarakat. Akibatnya demokrasi yang berkembang saat ini cenderung menghadirkan kebebasan yang berlebihan (*surplus of freedom*) dan melemahnya kepatuhan kepada pranata sosial dan hukum (*rule of law*).

Oleh karena itu, perlu ada kesadaran dan komitmen seluruh masyarakat untuk menghormati kemajemukan bangsa Indonesia dalam upaya mempersatukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui Pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, demi tegaknya NKRI menuju masa depan yang lebih baik berdasarkan Empat Konsensus Dasar. yang berintikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang

merupakan warisan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Sepanjang masih ada negara dan bangsa Indonesia, maka Empat Konsensus Dasar wajib dipegang teguh dan dipatuhi oleh seluruh Warga Negara Indonesia (WNI).

## **2. Apa visi Indonesia masa depan?**

Berdasarkan TAP MPR RI Nomor: VII/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan, telah dirumuskan visi Indonesia masa depan yang didasari dan diilhami oleh cita-cita luhur yang telah digariskan para pendiri negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang disebut **Visi Indonesia 2020**.

Dalam Visi Indonesia 2020 mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan tantangan yang dihadapi saat ini dan masa yang akan datang, serta memperhatikan kecenderungan terlaksananya secara terukur pada tahun 2020, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.

## **3. Apa tantangan menjelang tahun 2020?**

Tantangan bangsa dan negara Indonesia menjelang Tahun 2020 sesuai TAP MPR RI Nomor: VII/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan, adalah sebagai berikut:

- a. Pemantapan persatuan bangsa dan kesatuan negara;
- b. Sistem hukum yang adil;
- c. Sistem politik yang demokratis;
- d. Sistem ekonomi yang adil dan produktif;
- e. Sistem sosial budaya yang beradab;
- f. Sumber daya manusia yang bermutu;
- g. Globalisasi.

## **4. Mengapa pemantapan persatuan bangsa dan kesatuan negara/bangsa menjadi prioritas utama (pertama) tantangan Indonesia Tahun 2020?**

Kemajemukan suku, ras, agama, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang harus diterima dan dihormati. Pengelolaan kemajemukan bangsa secara baik merupakan tantangan dalam mempertahankan integrasi dan integritas bangsa.

Penyebaran penduduk yang tidak merata dan pengelolaan otonomi daerah yang menggunakan konsep negara kepulauan sesuai dengan Wawasan Nusantara, merupakan tantangan pembangunan daerah dalam lingkup NKRI. Di samping itu, pengaruh globalisasi juga merupakan tantangan bagi pementapan persatuan bangsa dan kesatuan negara.

Tanpa adanya Persatuan dan Kesatuan Bangsa, kita akan sulit membangun mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa “Persatuan Indonesia” merupakan hal yang sangat penting dan menjadi Sila Ketiga dari Pancasila yang merupakan dasar negara.

##### **5. Bagaimana cara mewujudkan pementapan persatuan dan kesatuan bangsa?**

Pementapan persatuan dan kesatuan bangsa dilakukan melalui integrasi nasional, yaitu proses dinamis yang menyatukan rakyat, wilayah, dan pemerintah sebagai komponen fungsional komunitas politik nasional, sehingga mampu untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional.

Konsepsi *Nation* (bangsa) oleh *founding fathers* kita adalah suatu entitas politik yang terdiri atas warga negara walaupun berbeda latar belakang, ras, etnik, suku, agama, budaya, golongan satu sama lain, namun punya kehendak yang kuat untuk bersatu. Secara kronologis, *Nation* (bangsa) harus ada terlebih dahulu sebelum adanya *the Nation State* (negara bangsa).

Hal itu berarti bahwa status kewarganegaraan secara yuridis formal saja tidak otomatis dengan sendirinya menjadikan sekelompok orang menjadi bagian suatu bangsa, karena harus membatinkan negara kedalam jiwanya. NKRI yang

diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 sebagai suatu negara nasional, mau tidak mau harus berlaku “*transfer of loyalty*” dari berbagai kelompok masyarakat kepada negara bangsa.

Proses transformasi yang dinamakan *nation building* (pembangunan bangsa) merupakan proses yang kompleks dan dinamis, serta berjangka panjang, karena kesetiaan pra-nasional tidak mungkin berubah secara sekejap. Memang harus diakui bahwa semangat nasionalisme lebih mudah ditanamkan pada generasi muda, daripada kepada generasi tua pada tatanan pra-nasional.

Proses menyatu dari berbagai suku untuk menjadi warga baru, yaitu warga NKRI, tidak selalu berjalan mulus (misalnya masih ada sekelompok kecil orang asli Papua yang ingin memisahkan diri dari NKRI). Problem yang melekat adalah problem pembentukan *nation* yang lebih dikenal menjadi “*nation building and character building*” sebagaimana yang dicanangkan oleh Bung Karno (Proklamator kemerdekaan/Presiden Pertama RI). Beliau sangat memahami dan menyadari kemajemukan bangsa Indonesia.

Kondisi tersebut mencerminkan masalah integrasi nasional harus dimantapkan secara terus menerus untuk dirawat, dikelola, diperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di dalam satu ikatan ke-Indonesia-an. Kondisi *nation* (bangsa) seperti itulah yang sesungguhnya dipersembahkan dan diwariskan para pendiri bangsa dan negara (*founding fathers*) kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dengan sesanti *Bhinneka Tunggal Ika* atau sekarang dikenal dengan Empat Konsensus Dasar.



Sumber : <http://aswajamuda.com/ini-alasan-nkri-harga-mati-bagi-nahdlatul-ulamal>

**Gambar 4.1: NKRI Harga Mati**

## 6. Syarat apa yang dibutuhkan bagi terwujudnya integrasi nasional?

Beberapa syarat yang dibutuhkan, antara lain:

- a. Adanya kesadaran, pemahaman dan tekad bersatu sebagai bangsa Indonesia sesuai Empat Konsensus Dasar;
- b. Adanya kesadaran, pemahaman dan kesepakatan tentang cita-cita dan tujuan nasional yang tercatat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945;
- c. Mewujudkan kesejahteraan dan keamanan yang berkeadilan di seluruh tanah air. Tanpa kesejahteraan yang berkeadilan, sulit diciptakan kondisi aman dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, tanpa kondisi keamanan yang kondusif, pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan sukar dilaksanakan. Kata kuncinya adalah kita mampu menjaga suasana damai.

## 7. Apa saja bagian-bagian dari integrasi nasional?

Integrasi nasional terdiri dari:

- a. Integrasi intern komponen (negara) yang terdiri dari:
  - 1) Integrasi intern rakyat (solidaritas sosial, pembauran, mobilitas horisontal dan vertikal, kerukunan intern dan antar umat beragama, hubungan intern dan antar etnik, hubungan industrial (pekerja dan majikan), liputan pers dan komunikasi massa lainnya);
  - 2) Integrasi intern pemerintah (keterbukaan rekrutmen politik, sirkulasi elit, komunikasi politik antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, *tour of duty and tour of area*, dan etika profesional birokrasi);
  - 3) Integrasi intern wilayah (dukungan jaringan infrastruktur, transportasi darat, laut dan udara, serta sarana komunikasi dan telekomunikasi).
- b. Integrasi antar komponen (negara) yang terdiri dari:
  - 1) Integrasi antar rakyat dan pemerintah (masalah demokrasi, kepemimpinan, sistem politik, legitimasi dan

pertanggungjawaban pemerintah, pembangunan hukum, sistem pemilu, desentralisasi dan otonomi daerah, penghormatan HAM, dan ketentuan tentang proses pergantian pemerintahan secara damai melalui Pemilu).

- 2) Integrasi antara rakyat dan wilayah (hak tradisional rakyat atas tanah rakyat, tata ruang, transmigrasi, hak pribadi dan komunal tanah untuk kepentingan umum, masalah lingkungan hidup).
- 3) Integrasi antara pemerintah dan wilayah (perbatasan negara, kerjasama dengan negara tetangga, penguasaan sumber daya nasional, pembangunan pertahanan dan keamanan, penegakan kedaulatan di darat, laut dan udara, ruang angkasa, serta pemeliharaan lingkungan).

## 8. Bagaimana peran nasionalisme dalam integrasi nasional?

Nasionalisme terdiri atas kata "*nation*" dan "*isme*". Secara umum "*nation* (bangsa)" berarti suatu masyarakat manusia yang memiliki wilayah, bahasa, kebudayaan, dan masa lalu yang sama, serta memiliki cita-cita yang sama. Sedangkan "*isme*" berarti "paham". Inti pengertian nasionalisme adalah suatu paham, suatu ideologi, suatu isme yang berisi kesadaran bahwa tiap-tiap anggota bangsa merupakan bagian dari suatu bangsa yang besar yang berkewajiban mencintai dan membela negaranya, dengan mendahulukan kepentingan rakyat Indonesia agar tidak terjajah secara politik, ekonomi, budaya, dan bahkan militer.

Setiap saat semua warga negara harus siap membela kepentingan bangsa negaranya serta siap berkorban demi kelangsungan hidup, keutuhan dan kebesaran perjuangan bangsanya. Sebelum kemerdekaan nasionalisme tumbuh untuk melawan penjajah, dan sesudah kemerdekaan adalah untuk mengisi kemerdekaan melalui pembangunan, dengan menjadikan konflik yang menjadi bibit disintegrasi bangsa, kemiskinan, kesenjangan sosial ekonomi, KKN, terorisme, separatis, dan lain-lain yang merugikan bangsa, sebagai "musuh bersama".



Hal ini tidak terlepas dari dampak negatif globalisasi, antara lain timbulnya sikap materialisme, individualisme, fanatisme kedaerahan dan pandangan agama yang sempit, sehingga sikap-sikap nasionalisme, persatuan dan kesatuan bangsa, serta sikap yang mengutamakan bangsa daripada kepentingan pribadi/kelompok cenderung semakin jauh dari masyarakat Indonesia.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan nasionalisme sangat penting dalam proses integrasi nasional atau kesatuan bangsa, dimana salah satunya diwujudkan melalui konsepsi Kewaspadaan Nasional. Sebaliknya ketidakberhasilan menanamkan rasa nasionalisme kedalam praksis penyelenggara negara mempunyai potensi dan membuka peluang timbulnya, bibit-bibit disintegrasi bangsa karena melemahnya ikatan kejiwaan bangsa (*collective memory*).

Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk dilakukan pemantapan wawasan kebangsaan yang berintikan Empat Konsensus Dasar, disertai dengan rasa nasionalisme yang tinggi dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional (aman dan sejahtera) sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

## **9. Kegiatan apa yang dapat membangkitkan semangat rasa Nasionalisme?**

Kita tidak lagi hidup di era penjajahan kolonial yang membutuhkan pengorbanan fisik, jiwa dan raga agar bangsa ini dapat lepas dan merdeka dari penjajahan. Hal itu sudah dilakukan oleh para pahlawan dan pejuang di masa lalu. *Frase* yang ada adalah seorang pahlawan mampu mengorbankan apapun yang dimilikinya untuk kepentingan bangsa dan negara.

Pada era global, sejatinya *frase* seperti itu tetap ada dan dipertahankan. Misalnya pengabdian seorang guru yang rela berkorban menjadi pengajar di daerah terpencil di perbatasan negara atau para atlet olahraga kita mampu meraih prestasi tertinggi di tingkat Internasional demi mengharumkan nama

bangsa. Jadi apapun semua profesinya yang dijalani, kita tetaplah berpotensi menjadi “pahlawan/pejuang”.

Semangat peringatan hari pahlawan tanggal 10 November, dapat dijadikan salah satu kegiatan meningkatkan rasa Nasionalisme untuk menghadapi berbagai persoalan bangsa yang masih kita hadapi, antara lain maraknya KKN, degradasi moral, dan memudarnya semangat solidaritas sosial.

Momentum hari Pahlawan adalah peluang untuk membangkitkan semangat perjuangan para pahlawan bangsa di masa lalu, yang rela mengorbankan apapun demi kejayaan bangsa dan negara. Hal ini akan membangkitkan semangat rasa nasionalisme dengan kesadaran kolektif kita untuk melangkah menjadi bangsa yang besar, dan bukan menjadi seremoni hampa makna, tidak membuat perubahan apapun bagi bangsa dan negara. Ada ungkapan, *“bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati perjuangan para pahlawannya”*. Untuk itu, harus ditumbuhkan kesadaran bela negara bagi generasi muda dalam menghadapi persaingan antar bangsa dalam era globalisasi (lihat Bab V tentang Kesadaran Bela Negara).

#### **10. Peluang apa untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa?**

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional, berarti merupakan perintah kepada para penyelenggara negara untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam mengatur kehidupan nasional guna mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, antara lain:

- a. Adanya Parpol dan Ormas, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama yang memiliki platform Pancasila, dapat memantapkan Empat Konsensus Dasar dalam mewujudkan sistem politik yang demokratis tanpa mengabaikan kepentingan nasional;
- b. Potensi Sumber Kekayaan Alam (SKA) yang besar dan beraneka ragam, wilayah kepulauan yang luas, serta posisi geografis yang strategis merupakan modal dasar pembangunan nasional;

- c. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dalam sistem ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan peluang dalam perdagangan bebas, diharapkan berpeluang meningkatkan kesejahteraan yang lebih merata;
- d. Sistem pendidikan nasional yang telah ada merupakan peluang, untuk memantapkan kembali pendidikan karakter sebagaimana yang telah diatur dalam kurikulum tahun 2013;
- e. TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, Polri dengan Tribrata, serta PNS dengan Panca Prasetya Korpri merupakan aparatur negara yang berfungsi sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, tetap memiliki tekad dan semangat untuk menciptakan suasana yang kondusif, mengelola stabilitas politik dan keamanan/pertahanan, serta menjaga dan menegakkan kedaulatan NKRI;
- f. Seluruh warga negara Indonesia yang memiliki jiwa bela Negara dan kesetiaan terhadap NKRI, merupakan potensi untuk dibina menjadi kekuatan dalam mengatasi timbulnya konflik, gerakan dan pemberontakan bersenjata kaum separatis maupun ancaman disintegrasi sosial;
- g. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan kesatuan bangsa, harus selalu mendapat perhatian dan perlakuan yang semestinya. Bahasa daerah dan bahasa asing tidak boleh menjadi faktor pengganggu integrasi nasional;
- h. Pengembangan budaya nasional disamping budaya daerah akan menanamkan dan mengembangkan rasa kebersamaan dan kesatuan sebagai bangsa sekalipun majemuk, tetap terikat dalam kesatuan ke-Indonesia-an;
- i. Sesanti *Bhinneka Tunggal Ika* secara sungguh-sungguh diimplementasikan dalam kehidupan kemasyarakatan dengan menanamkan konsepsi "*bersatu dalam keberagaman, harmoni dalam perbedaan*" yang intinya menonjolkan persamaan diantara semua perbedaan;

- j. Media massa yang merupakan pilar keempat demokrasi, dapat menjadi alat propaganda untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat.

### 11. Apa peran kearifan lokal dalam persatuan dan kesatuan bangsa?

Keberagaman budaya dan kearifan lokal di Indonesia bukanlah faktor pembeda dan pemecah belah, melainkan justru menjadi modal dan kekayaan nasional yang dapat merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan para pendiri bangsa menggali nilai-nilai Pancasila berasal dari nilai-nilai budaya daerah dan kearifan lokal yang tumbuh sejak dahulu kala, sebelum Indonesia di Proklamasikan pada 17 Agustus 1945. Sesanti *Bhinneka Tunggal Ika* memang sangat tepat menggambarkan kebangsaan Indonesia yang berbeda-beda namun tetap satu.

Dalam kondisi sekarang perlu dikembangkan konsepsi “*Bersatu Dalam Keberagaman dan Harmonis Dalam Perbedaan*” agar bangsa Indonesia tetap bersatu dengan jati diri bangsa yang memiliki karakter kuat, yaitu memiliki akhlak, moral dan budi pekerti yang baik, serta didukung memiliki pengetahuan (*knowledge*) dan berketrampilan (*skill*), untuk membangun bangsa Indonesia yang aman dan sejahtera.



Sumber: Dok kegiatan seminar Nasional Harmonisasi Sosial tgl 13 november 2015

**Gambar 4.2: Deputi VII/Kesbang, Arief P. Moekiyat menyampaikan Sambutan pada Seminar Nasional Harmonisasi Sosial**

## 12. Apa peran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Swasta dalam mendukung persatuan dan kesatuan untuk membangun bangsa dan negara?

PNS merupakan pegawai aparatur sipil negara yang berfungsi sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa yang berpegang teguh kepada nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, PNS yang bekerja di seluruh tanah air harus sadar dan wajib mendukung persatuan dan kesatuan bangsa.

Pegawai swasta juga harus menjaga kekompakan dalam mengurus negara. Kita apapun profesinya tidak boleh lupa bahwa kita semua perlu kompak dan bersatu demi negara ini.

Sejak di Sekolah Dasar kita sudah diajarkan filosofi untuk bersatu. Namun, betapa sering kita menyaksikan tindakan dan perjuangan setiap insan Indonesia tidak terlihat secara nyata menampilkan hal itu. Kita sadar toleransi itu penting, tetapi sering sekali kita menyaksikan beda pendapat atau keyakinan dalam berdemokrasi menjadi alasan orang untuk “menyerang” orang lain.

Ada orang mengatakan bahwa kekompakan sulit terbangun, karena kondisi masyarakat kita yang tidak berbahagia atau kurang berkecukupan. Di sisi lain, kita melihat keadaan ekonomi orang tua kita ataupun pejuang/pahlawan kita dulu hidupnya belum sejahtera, tetapi menunjukkan semangat tinggi untuk membangun bangsa bersama-sama.

Ungkapan “*mangan ora mangan kumpul*”, sebetulnya merupakan cerminan bahwa orang bisa bersatu, walaupun ia tidak berkecukupan. Kita bisa mengamati bukti-bukti bahwa sekalipun kita tidak terlalu puas dengan keadaan atau situasi kita, kita tetap bisa memperjuangkan kekompakan dan bersatu. Hal serupa pun bisa kita saksikan di perusahaan swasta dan atau BUMN, dimana perusahaan yang kompak, maka gaji dan lembur tidak sepenuhnya dipersoalkan. Saat individu-individu berkehendak memajukan perusahaan atau negara, upaya untuk bekerja keras,

lembur, keinginan belajar, tidak lagi semata diarahkan untuk kepentingan pribadi, tetapi selalu melibatkan kepentingan kelompok, perusahaan, atau negara.

Dengan demikian, perusahaan atau negara yang individunya kompak dan bersatu akan bisa mewujudkan pelayanan yang jauh lebih baik, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, investor berdatangan, dan kesejahteraanpun akan turut meningkat. Betapa hebatnya kelak keluaran (*output*) negara dengan bonus demografi yang individunya bersatu dan berkehendak untuk memajukan negara bangsa ini.

**13. Jelaskan langkah-langkah konkrit apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam ikut menjaga Persatuan dan kesatuan Bangsa?**

- a. Masyarakat harus yakin akan kebenaran Empat Konsensus Dasar, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Masyarakat harus berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah dan menghentikan pertikaian dan/atau konflik diantara kelompok masyarakat maupun dengan Pemerintah, baik yang berlatar belakang SARA, kesenjangan ekonomi dan sosial, serta lain-lain;
- c. Masyarakat melalui partisipasi para pemimpinnya, yakni tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda/perempuan dan/atau pimpinan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS), harus berpegang teguh dan melaksanakan semboyan negara "*Bhinneka Tunggal Ika*" yang diwujudkan dengan "*bersatu dalam keragaman dan harmoni dalam perbedaan*", untuk mengajak para anggota masyarakat menjunjung tinggi dan menjaga "*Persatuan dan Kesatuan Bangsa*" dalam menciptakan suasana damai, rukun, tentram dan rasa aman bagi masyarakat.

Berdasarkan kondisi damai dengan menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa, maka kita semua dapat melakukan aktifitas sehari-hari untuk bekerja mencari nafkah dalam meningkatkan

kesejahteraan, dan membangun bangsa sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

**14. Bagaimana membangun toleransi dalam kehidupan bermasyarakat khususnya hubungan antar umat beragama, mengingat masih sering terjadi gesekan di masyarakat?**

Pengertian toleransi adalah suatu sikap yang saling menghargai dan menghormati kelompok-kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lain. Toleransi adalah suatu perbuatan yang melarang terjadinya diskriminasi, sekalipun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam masyarakat. Toleransi bisa terlihat jelas pada agama, dimana toleransi agama sering kita jumpai di masyarakat. Pengertian toleransi antar umat beragama, yaitu meyakini bahwa agamaku adalah agamaku, agamamu adalah agamamu. Dengan kata lain, toleransi beragama adalah sikap saling menghargai dan menghormati agama orang lain dan tidak boleh memaksakan orang lain untuk menganut agama kita. Karena itu kita tidak diperbolehkan untuk mencela agama orang lain dengan alasan apapun, karena sejatinya kita adalah manusia Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila dan UUD 1945.

Para pendiri bangsa kita telah memberi contoh keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan disetujuinya penghapusan 7 kata yang tercantum dalam Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*), yaitu “*dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*” pada saat perumusan Dasar Negara (Pancasila) sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini mencerminkan betapa besarnya jiwa para pendiri bangsa yang mengutamakan toleransi dan kerukunan, mengingat wilayah Indonesia Timur masyarakatnya banyak yang beragama kristiani. Tersirat bahwa dalam membentuk bangsa dan negara Indonesia, para pendiri bangsa tidak memaksakan kehendaknya dengan pendekatan mayoritas-minoritas, dimana kita ketahui bahwa penduduk NKRI dihuni oleh mayoritas pemeluk agama Islam. Hal ini membuktikan bahwa kepentingan bangsa dan negara lebih diutamakan diatas kepentingan kelompok, agama, suku, golongan, daerah, dan etnis



yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia sesuai Semboyan Negara, "*Bhinneka Tunggal Ika*", yakni berbeda-beda namun tetap manunggal satu.

Menyadari bahwa masih ada gangguan dalam kerukunan umat beragama, maka perlu dilakukan upaya-upaya menumbuhkembangkan toleransi dan kerukunan umat beragama untuk mengembalikan nilai-nilai jatidiri/karakter bangsa Indonesia dengan meningkatkan kembali semangat gotong royong, sesuai Semboyan Negara Bhinneka Tunggal Ika yang diwujudkan dengan "*Bersatu Dalam Keragaman dan Harmoni Dalam Perbedaan*".

Dalam membangun toleransi di tengah masyarakat, maka salah satu konsep praktis yang dapat diaplikasikan adalah setidaknya setiap warga negara perlu mempunyai rasa empati, yakni kepedulian dan perhatian kepada sesama anak bangsa.

Dalam mewujudkan toleransi, khususnya antar umat beragama baik dalam membangun rumah ibadat maupun yang lain, diperlukan komunikasi yang efektif diantara umat beragama, melalui cara yang sederhana dengan memperhatikan prinsip 5 S, mulailah kita:

1. Saling senyum ketika bertatap muka, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah;
2. Saling menyapa dengan santun diantara umat beragama;
3. Saling mengenal satu sama lain (timbul empati);
4. Saling menghormati dan menghargai (toleransi);
5. Saling bekerjasama dan tolong-menolong (gotong royong).

Dengan landasan sikap dan perilaku yang memperhatikan 5 S tersebut, maka diharapkan akan terbangun kembali upaya mewujudkan toleransi, kerukunan, dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat kita. Terbangunnya semangat gotong royong tersebut, tentunya akan berkontribusi positif terhadap program yang sedang digalakkan oleh pemerintah, sesuai dengan Visi dan Misi Presiden RI, Bapak Jokowi.



Dalam masyarakat yang majemuk dan multikultur, agar Majelis-Majelis Agama hendaknya bersikap inklusif, menjaga hubungan yang seimbang dan harmoni, saling peduli, mencerminkan sikap dan perilaku yang sederhana, tidak melemahkan dan memandang rendah posisi kelompok satu dengan yang lain, tidak terjebak pada isu mayoritas-minoritas, dan meningkatkan solidaritas sebagai sesama anak bangsa.

"Kebhinnekaan" (keragaman, kemajemukan) ini dapat tetap "tunggal", apabila kita terus-menerus memelihara semangat persatuan, kesatuan, hidup menurut nilai-nilai Pancasila, yaitu pengendalian diri, tenggang rasa, dan toleransi terhadap sesama dan keanekaragaman itu sendiri. Mulailah dari diri sendiri, selanjutnya meluas dalam lingkup yang lebih besar, yaitu keluarga, golongan, antar umat beragama, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, bahwa toleransi, kerukunan, gotong royong, dan kebhinnekaan menjadi hal yang sangat penting dalam mengelola keragaman dan perbedaan yang menjadi karakter Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

**15. Apa manfaat pemantapan wawasan kebangsaan dalam mendukung bidang politik, hukum, dan keamanan?**

Pemantapan wawasan kebangsaan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta berpengaruh secara langsung atau tidak langsung dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara (IPOLEKSOSBUDHANKAM), serta khususnya dapat mendukung tugas-tugas Kemenko Polhukam, yang diuraikan secara singkat pada bidang politik, hukum, dan keamanan, meliputi:

**a. Bidang politik;** meningkatnya konsolidasi demokrasi, dengan indikator/hasil, antara lain:

- 1) Toleransi dan kerukunan yang mantap;
- 2) Keteladanan Pemimpin dan Budaya politik yang berkeadaban;
- 3) Memperkuat harmoni sosial dan kohesi sosial;

- 4) Memperbesar ruang dialog untuk mencari solusi damai dan bermartabat;
  - 5) Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak positif bagi dirinya dan masyarakat dalam demokrasi.
- b. Bidang hukum;** penegakan hukum yang berkeadilan dan kepatuhan hukum, dengan indikator/hasil, antara lain:
- 1) Peraturan perundang-undangan berpedoman kepada Pancasila dan UUD 1945, serta penghormatan HAM;
  - 2) Kepatuhan masyarakat terhadap pranata sosial dan aturan hukum;
  - 3) Penegakan hukum yang berkeadilan (cepat, tepat, dan adil);
  - 4) KKN berkurang secara drastis;
  - 5) Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan publik.



*Dok kegiatan seminar Nasional Harmonisasi Sosial tgl 13 november 2015*

**Gambar 4.3: Menko Polhukam, Jenderal TNI (Purn.) Luhut B. Pandjaitan menyampaikan Arahan pada Rapat Koordinasi**

- c. Bidang keamanan;** meningkatnya stabilitas keamanan yang mantap dan dinamis, dengan indikator/hasil, antara lain:
- 1) Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam kewaspadaan nasional (Kewaspadaan masyarakat untuk deteksi dini dan cegah dini);

- 2) Cara-cara damai dalam penyelesaian masalah untuk mewujudkan rasa aman, tertib dan tenteram bagi masyarakat (pendekatan budaya dan agama lebih diutamakan);
- 3) Meningkatkan rasa nasionalisme, cinta tanah air, dan solidaritas;
- 4) Memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara (NKRI) diatas kepentingan kelompok, golongan dan pribadi;
- 5) Terwujudnya rasa aman bagi masyarakat, serta aparaturnegara dapat bertindak cepat, tepat, dan tegas terhadap ancaman terorisme dan radikalisme maupun gangguan keamanan/pertahanan yang menghormati HAM dalam mempertahankan keutuhan NKRI;
- 6) Meningkatnya kesadaran Bela Negara melalui pendidikan kewarganegaraan, sehingga memiliki kebanggaan menjadi bagian dari Indonesia sesuai profesi dan peran masing-masing.





# BAB V

**BELA NEGARA ADALAH KEWAJIBAN DAN  
SEKALIGUS KEHORMATAN WARGA NEGARA  
SEBAGAI SALAH SATU WUJUD PENGABDIAN DAN  
SIKAP RELA BERKORBAN TERHADAP BANGSA  
DAN NEGARA SEBAGAIMANA AMANAT  
PASAL 27 AYAT (3) DAN PASAL 30 AYAT (1)  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945**

**KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**



*“Robek-Robeklah Badanku,  
Potong-Potonglah Jasad Ini, Tetapi Jiwaku  
Dilindungi Benteng Merah Putih,  
Akan Tetap Hidup, Tetap Menuntut  
Bela Siapapun Lawan yang Aku Hadapi”  
(Jenderal Soedirman)*

## **BAB V**

### **KESADARAN BELA NEGARA**

#### **1. Apa yang dimaksud bela negara?**

Upaya Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh Kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara (berdasarkan Penjelasan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara).

#### **2. Mengapa negara harus dibela?**

Negara diasumsikan sebagai makhluk hidup, mula-mula ia tidak ada, berkembang, dan bisa mati (bubar). Supaya tetap hidup, kita harus membela dan melindungi dari segala macam bentuk tantangan, hambatan, gangguan, dan ancaman. NKRI dibentuk oleh para pendiri bangsa adalah untuk selama-lamanya yang merupakan ruang hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, yang harus membela NKRI adalah seluruh warga negara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945.

Dengan demikian, bela negara bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI semata, tetapi merupakan tugas segenap WNI sesuai kemampuan dan profesinya dalam kehidupan. Spektrum bela negara sangat luas, mulai hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata, baik dalam bentuk ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun musuh bersenjata.

Esensi bela negara adalah bersikap dan berbuat serta bertindak yang terbaik dan berguna bagi bangsa dan negara yang dapat dikategorikan sebagai pejuang/patriot. Apabila dapat meningkatkan dan berprestasi bagi negara dan bangsa, maka sangat pantas mereka disebut sebagai “pahlawan bangsa” masa kini.

### 3. Apa saja nilai-nilai bela negara?

#### a. Cinta Tanah Air

Setiap warga negara harus mencintai tanah air sebagai ruang hidup dalam menjalankan kehidupannya yang selalu mendapat ancaman baik dari dalam maupun luar negeri; antara lain diwujudkan menjaga lingkungan hidup, mengenal wilayah tanah air, dan mencintai produk dalam negeri.

#### b. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Setiap warga negara dituntut mempunyai kesadaran atas tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat yang didukung pengetahuan, keterampilan, kompetensi serta pribadi manusia yang beriman, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan bersikap demokratis; antara lain diwujudkan dengan bersikap disiplin, bertanggung jawab, saling menghargai dan menghormati, menjaga kerukunan, berjiwa gotong royong, mendahulukan kewajiban daripada hak sebagai warga negara, serta mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan kelompok.

#### c. Yakin akan Pancasila sebagai Ideologi Negara

Setiap warga negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara mengacu dan berlandaskan ideologi Pancasila yang sudah terbukti mampu mempersatukan masyarakat Indonesia yang heterogen; antara lain diwujudkan dengan bertaqwa kepada Tuhan YME, menjalankan kewajiban agama, mempunyai kesadaran membantu sesama, memelihara persatuan dan kesatuan, mengedepankan musyawarah untuk mufakat, serta mewujudkan keadilan sosial.

#### d. Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara

Setiap warga negara harus mampu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi/golongan dan mencurahkan tenaga dan pikiran untuk menyelesaikan tugas, hak dan kewajiban tanpa pamrih; antara lain diwujudkan



dengan rela menolong sesama warga, mendahulukan kepentingan umum, bersedia menyumbang tenaga, pikiran, kemampuan, keahlian dan materi untuk kepentingan bangsa dan negara, siap membela bangsa dan negara, serta yakin pengorbanannya tidak sia-sia.

e. Memiliki Kemampuan Awal Secara Psikis dan Fisik untuk Bela Negara

Setiap warga negara harus mempunyai kemampuan psikis berupa sikap dan perilaku disiplin, ulet, bekerja keras, taat aturan, percaya kemampuan sendiri, tahan uji dan pantang menyerah serta mempunyai kemampuan fisik yang prima untuk mendukung kemampuan psikis; antara lain diwujudkan dengan mempunyai kondisi kesehatan fisik dan mental yang baik, memiliki keterampilan, integritas pribadi, pantang menyerah, dan disiplin, serta tanggap terhadap kondisi/peristiwa yang terjadi di masyarakat.

**4. Apa dasar hukum setiap Warga Negara Indonesia (WNI) wajib membela negara?**

Bela negara merupakan kebijakan yang dibuat oleh negara atau pemerintah yang bertujuan untuk melindungi negara dari ancaman musuh, baik yang datang secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini ditegaskan, antara lain:

- a. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”*;
- b. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi, *“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”*;
- c. Pasal 30 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi, *“Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”*.

Disamping amanat UUD 1945, ada beberapa Undang-undang yang juga mengatur tentang kesadaran bela negara, yaitu:

- a. Pasal 68 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi *“Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”*.
- b. Pasal 9 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang berbunyi:
  - (1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
  - (2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:
    - a. Pendidikan kewarganegaraan;
    - b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
    - c. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib;
    - d. Pengabdian sesuai dengan profesi.
  - (3) Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan Undang-undang.

Ketentuan peraturan perundang-undangan kesadaran bela negara, telah ditindaklanjuti diantaranya oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Mendagri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di daerah.

Berdasarkan amanat konstitusi yang telah ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka wajib hukumnya bagi setiap warga negara untuk melakukan bela negara. Berbagai kegiatan kesadaran bela negara yang dilakukan saat ini sesungguhnya merupakan perwujudan dari pendidikan kewarganegaraan dalam lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan pemukiman.

## 5. Apa hubungannya antara negara dan warga negara?

Hubungan antara negara dan warga negara adalah hubungan yang bersifat timbal balik. Negara membutuhkan warga negara, sedangkan warga negara membutuhkan negara, sehingga saling membutuhkan, saling melengkapi, dan saling mengisi (komplementer). Negara akan kuat apabila warga negaranya bersatu padu dan kompak membela negara. Sedangkan warga negara akan merasa aman, nyaman, damai, dan sejahtera apabila negara kuat, karena ada jaminan yang melindungi warga negara dari negara yang kuat.

Negara harus dibela, apabila memang negara tersebut amanah dalam menjalankan pemerintahannya. Tidak ada alasan bagi warga negara untuk menghindar dari kewajiban membela negara. Untuk itu, warga negara harus patuh, taat, loyal, dan tunduk pada setiap regulasi yang dibuat oleh negara dalam upaya meningkatkan kesadaran bela negara.

## 6. Dimana implementasi kesadaran bela negara dilaksanakan?

Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan, memfokuskan kepada pendidikan orang dewasa dalam pembinaan kesadaran bela negara pada tiga lingkungan, yaitu lingkungan pendidikan, lingkungan pemukiman, dan lingkungan pekerjaan, dengan uraian singkat sebagai berikut:

### a. Lingkungan pendidikan

- 1) Kegiatan intrakurikuler, yang dilakukan dengan berbagai metode, seperti:  
ceramah, diskusi, demonstrasi, pemecahan masalah, belajar sambil bermain, dan lain sebagainya.
- 2) Kegiatan ekstrakurikuler, seperti: pramuka, palang merah remaja, kesenian, bahasa, pencinta alam, dan lain sebagainya.
- 3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat/kemasyarakatan, seperti: unjuk kerja atau *trip observation* ke desa atau masyarakat sekitarnya, memperingati hari besar nasional bersama masyarakat.

- 4) Kegiatan penciptaan kondisi lingkungan sekolah yang kondusif, seperti: membangun lapangan olah raga, tempat ibadah, berdoa sebelum dan sesudah belajar, konseling, dan lain sebagainya.

b. Lingkungan Pekerjaan

- 1) Kegiatan pendidikan yang terencana di lingkungan pekerjaan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pembekalan pimpinan atau jam komandan, *coffee morning*, presentasi rencana program oleh tiap-tiap unit kerja secara bergiliran, dan pembentukan organisasi belajar lainnya yang dibentuk di lingkungan kerja tersebut (kelompok kerja, kepanitiaan khusus dan lain sebagainya).
- 2) Kegiatan tambahan yang menunjang semangat kerja seperti olah raga bersama, rekreasi, siraman rohani, dan lain sebagainya.
- 3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seperti menolong korban bencana alam, kunjungan ke panti asuhan dan anak yatim piatu, donor darah, bakti sosial dan lain sebagainya.
- 4) Kegiatan penciptaan kondisi lingkungan kerja yang kondusif, seperti pembangunan tempat ibadah, lapangan olah raga, *fitness centre*, balai pengobatan, taman, pengamanan dan lain sebagainya.

c. Lingkungan Pemukiman

- 1) Kegiatan pendidikan dan pelatihan masyarakat.
- 2) Kegiatan yang menunjang integrasi masyarakat, seperti gotong royong, olah raga, rekreasi, siraman rohani, pentas seni budaya, dan lain sebagainya.
- 3) Kegiatan solidaritas sosial, seperti mengunjungi tetangga yang sakit, musibah kematian, kebakaran, membantu tetangga yang kesusahan, dan lain sebagainya.
- 4) Kegiatan penciptaan kondisi lingkungan pemukiman yang kondusif, seperti membentuk perkumpulan/forum,

membangun lapangan olah raga, membangun rumah ibadah, siskamling dan lain sebagainya.

Setiap warga negara Indonesia sesuai profesi dan perannya dapat melaksanakan upaya bela negara agar dapat memberikan yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara.

**7. Apa yang diharapkan dari hasil pelaksanaan pendidikan kesadaran bela negara?**

Setiap WNI diharapkan memiliki pola sikap, pola pikir, dan pola tindak yang mencerminkan nilai-nilai bela negara sesuai bidang profesinya di semua aspek kehidupan nasional, serta memiliki wawasan dan kesadaran bernegara sebagai wujud kecintaannya kepada tanah air Indonesia. Disamping itu, memiliki karakter dan jatidiri bangsa yang kuat, sehingga memiliki daya tangkal yang kokoh guna menghadapi ancaman yang sifatnya multidimensi terhadap kedaulatan dan kelangsungan hidup NKRI.



*Sumber : Kemhan RI*

**Gambar 5.1: Nilai-nilai Bela Negara**

## 8. Bagaimana menumbuhkan kesadaran bela negara?

Bela negara adalah amanat konstitusi/UUD 1945, sehingga Pendidikan Kesadaran Bela Negara harus diajarkan sejak dini, mulai dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi (dari TK s/d Universitas), serta orang dewasa. Memang saat ini kurikulum Tahun 2013 tidak secara eksplisit mencantumkan hal tersebut, namun tidak menghambat untuk menyampaikan materi Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, Sejarah Perjuangan Bangsa, Budi Pekerti, dan mata pelajaran lainnya yang relevan, serta Pramuka yang menjadi kewajiban Ekstra Kurikuler (Pendidikan Non Formal).

Pendidikan Bela Negara harus berupaya membuat peserta menjadi betah, senang, riang gembira, menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dicerna dan diterima masyarakat, sehingga tidak terkesan seperti WAJIB MILITER dan/atau militerisasi warga sipil, sebagaimana dikhawatirkan oleh sebagian elit-elit politik yang dianggap seperti Era Orde Baru (militer akan kembali memasuki bidang politik). Materi-materi Bela Negara jangan menggunakan "*bahasa-bahasa dewa*", tetapi harus diberi pemahaman yang riil sesuai kondisi dan tantangan kedepan, agar mudah diresapi, dihayati, dan dijiwai oleh semua unsur masyarakat untuk bekal Bela Negara dalam semua aspek Kehidupan ideologi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM).

## 9. Mengapa kesadaran bela negara harus diprioritaskan kepada generasi muda?

Generasi muda adalah harapan dan calon pemimpin bangsa, namun pada kenyataannya terdapat banyak permasalahan yang melanda generasi muda kita, diantaranya, menurunnya keimanan, ketaqwaan dan wawasan kebangsaan, rendahnya daya saing dalam menghadapi globalisasi, meningkatnya penyalahgunaan narkoba, kasus kekerasan (tawuran), *bullying*, serta pergaulan bebas. Kondisi tersebut diperparah dengan masih adanya fenomena kegiatan Masa Orientasi Sekolah (MOS) dan mahasiswa di era pasca reformasi yang tampaknya

telah mengalami disorientasi tujuan, sehingga perlu adanya tindakan preventif supaya siswa dan mahasiswa tidak menjadi korban akibat kegiatan tersebut, berupa modifikasi baru konstruksi dasar MOS.

Mahasiswa/ perguruan tinggi dalam setiap tahun ajaran baru (Agustus s/d September) merupakan peluang yang baik, dimana para mahasiswa baru harus menjalani OSPEK atau nama lain (Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru), maka bisa dimasukkan Pendidikan Kesadaran Bela Negara yang merupakan bagian dari pemantapan wawasan kebangsaan yang berintikan Empat Konsensus Dasar Bangsa (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) sebagai salah satu kegiatan Ospek tersebut.



Sumber: <http://mrasyidnur.blogspot.co.id/2014/11/makna-hari-pahlawan-bagi-siswa.html>

Gambar 5.2: Peringatan Hari Pahlawan

## 10. Faktor-faktor apa yang menghambat kesadaran bela negara?

Sebagian generasi muda cenderung enggan untuk berhubungan dengan bela negara, karena cenderung terjebak dan ikut terlarut dampak negatif globalisasi yang berorientasi bergaya hidup *individualistik*, *hedonisme*, *materialistis*, *pragmatis*, dan melupakan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kalangan pemuda sebagai agen perubahan kadangkala sudah terjebak pada kepentingan pribadi, kelompok, golongan, dan kepentingan lain yang bersifat sempit dan jangka pendek. Bahkan disinyalir



organisasi kepemudaan yang seharusnya netral dari kepentingan politik dan independen dalam berkarya, justru malah cenderung menjadi “*underbouw*” dari Parpol tertentu, sehingga program dan kegiatan yang dijalankan terjebak pada kepentingan Parpol dan jauh daripada kepentingan membela negara.

Disamping itu, karena pengaruh globalisasi, kapitalisme, dan berbagai nilai-nilai budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, maka sebagian para pemuda mengalami rapuh dalam sikap, pendirian, dan etos kerja. Untuk itulah, secara tegas Bapak Presiden RI, Jokowi memprioritaskan Nawacita dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental yang meliputi tiga nilai dasar, yaitu integritas, etos kerja/kerja keras, dan gotong royong dalam mewujudkan visi dan misi Kabinet Kerja 2014-2019.

#### **11. Apa bedanya bela negara dengan wajib militer?**

Bela negara dan wajib militer sangat terkait satu sama lainnya. Wajib militer merupakan salah satu sarana atau instrumen pelaksanaan bela negara. Bela negara lazim diimplementasikan di negara lain melalui wajib militer. Sedangkan di Indonesia belum dianggap prioritas oleh elit-elit politik, karena wajib militer cenderung dianggap sebagai upaya “*militerisasi*” atau dipandang negatif sebagai upaya masuknya militer dalam politik yang menimbulkan kegamangan/trauma di masa lampau, khususnya di Era Orde Baru. Para aktivis yang mengaku pro demokrasi dan HAM menolak adanya “*militerisasi sipil*”, karena tidak sesuai dengan konsolidasi demokrasi yang dilaksanakan sejak memasuki era reformasi tahun 1998.

Persepsi keliru ini sepertinya perlu diluruskan karena di negara yang demokratis seperti Amerika Serikat, wajib militer harus dilaksanakan oleh setiap warga negara. Beberapa negara lain, seperti Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura sudah jauh lebih dahulu menerapkan program wajib militer bagi warga negaranya yang berusia antara 18 s.d. 30 tahun. Wajib militer sangat baik tujuannya, yakni untuk melindungi negara dari berbagai macam ancaman dan meningkatkan soliditas antar komponen bangsa.



Wajib militer (wamil) adalah kewajiban seorang warga negara berusia muda untuk menyandang senjata dan menjadi anggota tentara dan mengikuti pendidikan militer guna meningkatkan ketangguhan, kedisiplinan, keberanian, dan kemandirian seorang warga negara. Warga wanita biasanya tidak diharuskan wamil, tetapi ada juga negara yang mewajibkannya seperti di Israel dan Korea Selatan. Pada beberapa negara di Asia Tenggara juga dilakukan wamil, antara lain:

- a. Malaysia, biasa disebut Program Latihan Khidmat Negara (PKLN). Program ini dilaksanakan untuk pria berumur 18 tahun keatas dengan jangka waktu pendek 3 (tiga) bulan. Program ini dicanangkan Pemerintah Malaysia sejak Desember 2003;
- b. Singapura, disebut *National Service*, diwajibkan untuk pria yang berumur 18 tahun keatas, dengan jangka waktu wamil 22 sampai dengan 24 bulan. Program ini dijalankan sejak tahun 1967;
- c. Korea Selatan, diwajibkan untuk pria yang berumur 18 s.d. 30 tahun, dengan jangka waktu 22 bulan untuk bintara dan 3 tahun untuk jenjang perwira.

Mengingat saat ini kita memasuki era globalisasi yang penuh persaingan dengan bangsa-bangsa lain dan munculnya berbagai bentuk ancaman bangsa, maka sudah sepatutnya para elit politik berkenan kembali untuk membahas RUU Komponen Cadangan (didalamnya antara lain mengatur penerapan wajib militer) yang sudah bertahun-tahun diusulkan oleh Pemerintah, namun belum mendapat tanggapan yang positif dari DPR RI untuk dibahas dan disetujui bersama menjadi Undang-undang.

## 12. Bagaimana bela negara di wilayah perbatasan?

Indonesia memiliki perbatasan dengan 10 (sepuluh) negara, 3 (tiga) diantaranya mempunyai hubungan perbatasan darat, yaitu Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Daerah perbatasan seluruhnya tersebar di 41 (empat puluh satu) Kabupaten/Kota dan di 13 (tiga belas) Provinsi yang berbatasan dengan 10 Negara tetangga.

Kewaspadaan bangsa Indonesia terhadap berbagai pihak dan kepentingan asing harus ditingkatkan oleh semua komponen bangsa, termasuk masyarakat yang berada di wilayah perbatasan, pulau kecil terluar dan wilayah pedalaman. Wilayah perbatasan yang sangat luas baik didarat maupun dilaut, tidak semua dapat terjaga secara optimal oleh TNI, karena keterbatasan personil dan peralatan. Masyarakat perbatasan sangat rawan dengan berbagai penetrasi dan infiltrasi asing, karena secara geografis langsung berhubungan dengan negara lain. Disamping itu, secara ekonomi terdapat interaksi dan atau transaksi, serta secara sosio kultural terdapat hubungan kekerabatan yang erat. Karakteristik masyarakatnya masih kurang memahami wawasan kebangsaan, rasa nasionalisme, dan cinta tanah air. Kemiskinan, minimnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan mahalnya barang-barang kebutuhan toko serta pekerjaan yang layak sangat sulit menjadikan masyarakat di wilayah perbatasan cenderung apatis, sehingga cenderung sangat mudah dipengaruhi oleh elit-elit lokal yang mempunyai kepentingan politik praktis atau kepentingan politik tertentu. Wilayah perbatasan tentu saja sangat rawan secara ideologis dan politis, khususnya dapat dilalui para pelaku kejahatan trans nasional dan pelaku aksi separatisme serta terorisme yang melintas batas di jalan-jalan tikus, sehingga sulit untuk dideteksi secara dini oleh aparat TNI/Polri.

Dalam RPJMN tahun 2015-2019 ada 10 daerah yang akan dikembangkan menjadi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 Kecamatan perbatasan ditetapkan menjadi lokasi prioritas pembangunan. Daerah yang ditetapkan sebagai PKSN akan didorong untuk menjadi kawasan/perkotaan yang dapat mendorong pengembangan kecamatan perbatasan disekitarnya.

Pemerintah bertekad untuk membangun infrastruktur perbatasan yang diprioritaskan setidaknya pada 5 (lima) komponen, meliputi infrastruktur jalan, air bersih, listrik, pendidikan, dan kesehatan. Disamping itu, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan dan TNI secara terus menerus melakukan upaya pembinaan

kesadaran bela negara sekalipun dengan keterbatasan. Untuk itu, selain kebutuhan fisik yang mendasar, perlu diprioritaskan pula pembangunan non fisik bagi tokoh-tokoh masyarakat, adat, dan agama di wilayah perbatasan yang merupakan kombinasi pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan, serta memperhatikan pendekatan lingkungan hidup.

Dalam konteks ini, masyarakat di wilayah perbatasan harus dibekali dengan kesadaran bela negara yang kuat. Masyarakat perbatasan merupakan benteng pertama dalam melawan berbagai macam ancaman, berupa infiltrasi dan penetrasi asing yang masuk ke wilayah Indonesia, sehingga dapat mengancam kedaulatan negara. Mereka harus diberi kesadaran akan pentingnya membela negara di perbatasan. Masyarakat perbatasan harus mampu menciptakan sistem peringatan dini dan deteksi dini secara mandiri, sehingga akan dapat menangkal berbagai pengaruh asing yang masuk ke wilayah Indonesia.

### 13. Siapa yang bertanggung jawab dalam pembinaan kesadaran bela negara?

Pemerintah wajib menjalankan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) sesuai perintah UUD 1945, Undang-undang, dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan RI bersama instansi K/L terkait, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.



Sumber : Dok Kegiatan Diklat Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Prov. Jawa Timur tgl. 19 November 2015

**Gambar 5.3: Diklat Bela Negara di Jawa Timur**

Sejalan dengan hal tersebut, pada tanggal 6 Agustus 2015 telah ditandatangani Kesepakatan Bersama (MoU) tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara oleh 10 Pejabat Eselon I dari K/L terkait yaitu Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemenhan, Kemenag, Kemenpan dan RB, Kemendikbud, Kemenristek Dikti, Kemenpora, Mabes Polri, dan Kwarnas Pramuka serta disaksikan oleh Mendagri, Menhan, dan Menpan RB. Adapun tujuan MoU adalah agar program kesadaran bela negara (*soft power*) dapat berjalan lebih terkoordinasi, sinergi, dan berkelanjutan sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing.

#### **14. Apa pandangan Presiden RI Bapak Jokowi mengenai Bela Negara?**

Pidato Presiden RI pada Peringatan Hari Bela Negara pada tanggal 19 Desember 2014 yang dibacakan oleh Menko Polhukam menegaskan antara lain:

- a. Konstitusi mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Amanat konstitusi ini tentu saja tidak lahir dalam ruang kosong, namun berakar dari sejarah perjuangan bangsa. Republik Indonesia bisa berdiri tegak sebagai negara bangsa yang berdaulat tidak lepas dari perjuangan seluruh kekuatan rakyat, mulai dari petani, pedagang kecil, nelayan, dan elemen rakyat lainnya untuk membela tanah air;
- b. membela negara tidak hanya dilakukan oleh militer dengan kekuatan senjata, tetapi juga dilakukan oleh setiap warga negara dengan kesadarannya melalui upaya-upaya non-militer seperti politik maupun diplomasi;
- c. Saat ini, tantangan dan ancaman terhadap kedaulatan bangsa, sifatnya sudah multidimensi. Itu artinya, ancaman tidak lagi bersifat konvensional atau fisik semata akan tetapi sudah berkembang baik fisik maupun non fisik. Ancaman berkembang menjadi bersifat multidimensi karena karakter ancaman dapat bersumber dari ideologi, politik, ekonomi sosial budaya. Sehingga hal ini mengharuskan kita untuk mendefinisikan ulang apa yang kita maksud dengan Bela Negara;

- d. Upaya untuk melawan aksi pencurian ikan di perairan kita adalah tindakan bela negara. Setiap tahun ratusan juta ton ikan kita dicuri. Bagi saya upaya mewujudkan kedaulatan pangan adalah bela negara. Upaya untuk bisa tegak berdiri di kaki sendiri secara ekonomi juga adalah upaya bela negara. Para guru, bidan dan tenaga kesehatan yang tengah berjuang melakukan tugasnya di pelosok Tanah Air, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terluar sesungguhnya sedang melakukan bela negara. Merekalah yang telah membuat Republik ini bisa tetap eksis untuk hadir melayani rakyatnya;
- e. Upaya kita melawan ancaman kemiskinan, keterbelakangan dan ketertinggalan adalah upaya bela negara. Negara ini akan menjadi kokoh dan besar ketika bisa memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Selain itu, ancaman atas kedaulatan kita muncul dari tindak pidana kejahatan luar biasa, yakni korupsi, yang telah nyata-nyata merusak fondasi kekuatan kita sebagai bangsa dan menjauhkan rakyat dari kesejahteraan. Upaya untuk melawan korupsi di semua tingkatan merupakan wujud pembelaan kita pada negara;
- f. Saat ini, kita juga sedang menghadapi ancaman keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional yang dilakukan oleh aktor non-negara yang memiliki kemampuan teknologi serta dukungan finansial yang kuat, dengan jaringan yang rapi dan tersebar di sejumlah negara. Banyak anak-anak kita yang terjebak dalam ketergantungan pada narkoba. Banyak warga negara kita yang juga masuk dalam jaringan perdagangan manusia. Kita harus melawan kejahatan kemanusiaan ini sebagai bagian dari kecintaan kita pada Tanah Air;
- g. Tantangan besar dalam sejarah adalah bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup kita sebagai bangsa yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi serta berkepribadian dalam bidang kebudayaan berlandaskan gotong royong;

- h. Bela Negara memiliki spektrum yang sangat luas di berbagai bidang kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial dan budaya. Bela Negara bisa dilakukan oleh setiap warga negara dari berbagai latar belakang profesi: mulai dari petani, buruh, profesional sampai dengan pedagang, sesuai peran dan profesi warga negara;
- i. Kita perlu membangun keinsyafan bersama bahwa kelangsungan hidup kita sebagai bangsa bukan tergantung pada kekuatan militer semata. Kelangsungan hidup kita sebagai bangsa adalah penjumlahan dari seluruh kekuatan rakyat. Dengan kekuatan rakyat semesta, maka bangsa ini akan mampu menghadapi segala jenis ancaman dan tantangan. Itulah esensi dari sistem pertahanan rakyat semesta yang terbukti dalam sejarah bisa membuat Republik ini berdiri tegak;
- j. Tugas sejarah kita adalah membela negara ini dari kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan dan ketergantungan. Tugas Bela Negara ini adalah tugas yang maha berat yang ada di depan mata kita saat ini. Tapi dengan semangat persatuan, kerja keras dan perjuangan kita bersama, tugas sejarah itu bisa kita pikul bersama.



Sumber : <http://seroja-08.blogspot.co.id/>

**Gambar 5.4: Berbagai Profesi dan Peran Masyarakat Dalam Bela Negara**

## 15. Apa keterkaitan program pembinaan kesadaran Bela Negara dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental?

Pendidikan kesadaran bela negara sesungguhnya merupakan salah satu program yang langsung dapat mendukung perwujudan Gerakan Nasional Revolusi Mental, mengingat gerakan nasional ini dicanangkan kembali oleh Bapak Presiden RI untuk menumbuhkan nilai-nilai integritas (jujur, berwibawa, dan dapat dipercaya), etos kerja (kerja keras, kreatif, produktif, dan memiliki daya saing), dan gotong royong (saling berkomunikasi, saling membantu, bekerjasama, dan saling menghargai/toleransi). Saatnya kita mengubah cara pandang, pola pikir, sikap dan perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam bidang politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan berlandaskan gotong royong sesuai Visi Kabinet Kerja Tahun 2014-2019.

Revolusi mental dimulai dari diri sendiri, Keluarga, lingkungan (masyarakat, sekolah, organisasi dan lembaga/institusi negara). Beberapa contoh kegiatan revolusi mental, sebagai berikut:

- a. Pemerintah
  - 1) Reformasi birokrasi;
  - 2) Pelayanan satu atap;
  - 3) Pembuatan SOP pelayanan publik di seluruh Indonesia;
  - 4) Gerakan disiplin waktu kerja;
  - 5) Pendidikan karakter di sekolah-sekolah.
- b. Swasta
  - 1) Penguatan kemitraan pengusaha kecil, menengah, dan besar;
  - 2) Insentif bagi produk lokal yang inovatif.
- c. Masyarakat
  - 1) Gerakan taat hukum;
  - 2) Gerakan hidup bersih;
  - 3) Gerakan peduli lingkungan;
  - 4) Gerakan tertib berlalu-lintas.







## B A B VI

**BANGSA INDONESIA BERPEGANG TEGUH  
PADA EMPAT KONSENSUS DASAR, DAN MEMILIKI  
JATI DIRI/KARAKTER BANGSA YANG BERORIENTASI  
PADA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI,  
SERTA SENI DAN BUDAYA;  
MAKA AKAN MENJADI BANGSA YANG MAJU,  
SEJAHTERA, DAN UNGGUL DALAM PERCATURAN  
GLOBALISASI UNTUK MEWUJUDKAN  
VISI INDONESIA 2020.**

**KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**



*“Sekencang Apapun Arus Globalisasi  
Yang Menerjang NKRI, Pancasila  
Harus Tetap Sebagai Ideologi Negara Dan  
Cerminan Jatidiri Bangsa Indonesi Dalam  
Berbangsa, Bernegara, Dan Bermasyarakat,  
Apapun Resiko Dan Taruhannya”  
(H. M. Soeharto)*

## BAB VI

### PENUTUP

Pemantapan wawasan kebangsaan bertujuan agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman dan kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam wadah NKRI dengan sesanti *Bhinneka Tunggal Ika*, serta dilaksanakan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar tetap kokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Dunia terus berubah dengan segala pengaruhnya. Demikian pula negara Indonesia mengalami berbagai dinamika dan perubahan dalam mengarungi masa depannya. Namun, satu hal yang harus dipegang teguh yang menjadi amanah para pendiri bangsa dan konsensus dasar kita, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa.

Kita juga perlu terus mempertahankan nilai, jati diri dan karakter bangsa kita yang luhur dan terhormat. Kita perlu terus meningkatkan semangat dan etos kerja sebagai bangsa yang kuat dan gigih, dan bukan bangsa yang lemah dan mudah menyerah. Kita terus membangun peradaban yang menghadirkan persaudaraan, persahabatan dan kerukunan bangsa.

Bangsa Indonesia akan kokoh dan tetap berdiri untuk selama-lamanya yang mempedomani Empat Konsensus Dasar, meskipun krisis dan ujian berat datang silih berganti. Kunci dari semua itu adalah persatuan, kekompakan dan kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Jiwa dan semangat semua ini adalah keharusan kita untuk bersatu dalam perbedaan sebagaimana tertuang dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Bangsa Indonesia amat majemuk ditinjau dari berbagai sudut suku, daerah, budaya, agama, adat istiadat dan berbagai identitas lainnya. Namun, kemajemukan dan perbedaan ini janganlah menjadi penghalang untuk membangun persaudaraan, kerukunan, dan harmoni di bumi pertiwi ini. Kita semua memiliki tanggung jawab

moral untuk terus menjadikan Indonesia yang kita cintai ini sebagai taman kehidupan yang indah dan teduh, dimana semua anak bangsa mendapatkan ketenteraman, kedamaian dan harapan terhadap masa depan yang cerah.

Pemantapan Wawasan Kebangsaan yang berintikan Empat Konsensus Dasar merupakan upaya menanamkan kembali rasa kebangsaan, semangat kebangsaan dan tekad/komitmen kebangsaan yang kuat, dalam meningkatkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa dan negara Indonesia ditengah persahabatan dunia yang semakin demokratis, semakin adil, dan semakin sejahtera.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Daftar Bacaan

- Agun Gunandjar Sudarsa, 2013, Pancasila sebagai Rumah Bersama, Bunga Rampai Pemikiran Tentang Kebangsaan, RM Books, Jakarta.
- A. Yani Wahid dan A. Bakir Ihsan, 2004, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Resolusi Konflik, Langkah-Langkah Penyelesaian Konflik di Aceh, Atambua, Maluku, Papua, Poso, dan Sampit, Relawan Bangsa, Jakarta.
- Arief Poerboyo Moekiyat, 2009, Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Terhadap Konflik Komunal Guna Mendukung Stabilitas Ekonomi Dalam Rangka Ketahanan Nasional, KKA, Lemhannas, Jakarta.
- Arief Poerboyo Moekiyat, 2012, Telaahan Kebijakan Penanganan Konflik Sosial, Kemenko Polhukam, Jakarta.
- Djoko Suyanto, Menko Polhukam, 2013, *Keynote Speaker* Dalam Acara Sarasehan Nasional Komitmen Kebangsaan, November, Jakarta.
- Ermaya Suradinata, Prof. Dr. SH, MS, MH, 2006, Otonomi Daerah dan Paradigma Baru Kepemimpinan Pemerintahan dalam Politik dan Bisnis, Penerbit Suara Bebas, Jakarta.
- Jero Wacik, Ir. SE., Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, 2011, 24 Karakter Modal Membangun Bangsa, *Ganeca Exact*.
- Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, 2009, Pokja Kewaspadaan Nasional, Bidang Studi (BS)/Materi Pokok Kewaspadaan Nasional, Sub BS Manajemen Konflik, Lemhannas.
- Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, 2013, Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Jakarta.

- Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, 2014, Materi Dialog Kebangsaan Pimpinan Tingkat Nasional Tahun 2014, Tema: Pemantapan Wawasan Kebangsaan Guna Mewujudkan Pimpinan Tingkat Nasional yang Berkarakter, Jakarta.
- Kemenko Polhukam, 2008, Sosialisasi Pancasila, Jakarta.
- Kemenko Polhukam, 2008, Wawasan Kebangsaan Konsepsi dan Aktualisasi, Jakarta.
- Kemenko Polhukam, 2008, Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Membangun Kemandirian dan Keberagaman Bangsa dalam Semangat Kebangsaan, Jakarta.
- Kemenko Polhukam, 2008, Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Memantapkan Karakter dan Jatidiri Bangsa, Jakarta.
- Kemenko Polhukam, 2009, Membangun Kemitraan Antara Pemerintah dan *Civil Society* dalam Implementasi Pancasila, Jakarta.
- Kemenko Polhukam, 2009, Memantapkan Peran Masyarakat dalam Penguatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Jakarta.
- Kemenko Polhukam, 2009, Memantapkan Karakter dan Jatidiri Bangsa dalam Dinamika Global, Jakarta.
- Kemenko Polhukam, 2009, Analisis Kebijakan tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Jakarta.
- Kemenko Polhukam, 2009, Analisis Kebijakan tentang Strategi Revitalisasi Implementasi Pancasila, Jakarta.
- Kemenko Polhukam, 2009, Laporan Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Dampak Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Jakarta.
- Kemenko Polhukam RI, 2013, Desain Induk Pemantapan Wawasan Kebangsaan 2012-2024, Jakarta.

Putu Sastra Wingata, Mayjen TNI, 2005, Kewaspadaan Nasional, Disintegrasi dan Persepsi Terhadap Ancaman, Bahan Ceramah Sosialisasi Konsepsi Nasional, Peserta Kursus Lemhannas RI, Sesko Angkatan dan Sesko TNI.

Sekretariat Negara, 2006, Keterangan Pemerintah Tentang Kebijakan Pembangunan Daerah di Depan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Jakarta.

Susilo Bambang Yudhoyono, DR. H, 2006, Menata Kembali Kerangka Kehidupan Negara Berdasarkan Pancasila, Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Memperingati Hari Lahir Pancasila, Jakarta *Convention Center*, 1 Juni 2006.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XVIII/MPR/1998 Tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (*Ekaprasetia Pancakarsa*) dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: VI/MPR/2000 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: VII/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.

Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Mahkamah Konstitusi, 2013, Putusan Nomor: 100/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta (*menghilangkan frasa “Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara”*).



- Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar.
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-367/Menko/Polhukam/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor: 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB, dan Pendirian Rumah Ibadat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah (FKDM).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 71 Tahun 2012 tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Garuda\\_Pancasila.jpg:garuda Pancasila.](https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Garuda_Pancasila.jpg:garuda_Pancasila)
- [http://restukadilangudemak.blogspot.co.id/2013/04/makalah-pembinaan - karakter - bangsa\\_24.html](http://restukadilangudemak.blogspot.co.id/2013/04/makalah-pembinaan-karakter-bangsa_24.html): Karakter Bangsa.
- <https://komangarya900089.wordpress.com/2010/08/16/edisi-merah-putih-bangga-jadi-orang-indonesia/>: Bangsa Jadi Orang Indonesia.

[http://aswajamuda.com/ini-alasan-nkri-harga-mati-bagi\\_nahdlatul-ulama/](http://aswajamuda.com/ini-alasan-nkri-harga-mati-bagi_nahdlatul-ulama/): NKRI Harga Mati.

<http://cahyalfc.blogspot.co.id/2012/07/Kedamaian-itu-ada-ketika-kita-mau.html>: Persatuan dalam Kebhinnekaan.

<http://mrasyidnur.blogspot.co.id/2014/11/makna-hari-pahlawan-bagi-siswa.html>: Peringatan Hari Pahlawan.

<http://seroja-08.blogspot.co.id/>: Berbagai Profesi dan Peran Masyarakat Dalam Bela Negara.

<https://sdnmargajayaiv.wordpress.com/2011/09/05/tata-upacara-bendera/>: SD upacara bendera.

<https://buzzerbeezz.files.wordpress.com/2012/11/scan10112.jpg>: peta Indonesia.



# LAMPIRAN

**HIMBAUAN:  
HIDUP BERDAMPINGAN SECARA RUKUN  
DAN DAMAI DENGAN BERTOLERANSI**

**Dalam Rangka Pemantapan Wawasan  
Kebangsaan dan Karakter Bangsa**

**KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**





## **HIMBAUAN:**

### **HIDUP BERDAMPINGAN SECARA RUKUN DAN DAMAI DENGAN BERTOLERANSI**

#### **Dalam Rangka Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa**

1. Indonesia adalah negara yang besar  
Suku bangsanya beraneka ragam  
Agamanya pun berbeda-beda  
Perbedaan harus dihargai  
Mari kita ber-toleransi
2. Di sekolah/kampus, lingkungan kerja, dan masyarakat juga ada perbedaan  
Misalnya perbedaan suku, agama, dan budaya  
Walaupun berbeda, namun harus dihargai  
Agar semua hidup rukun dan damai
3. Perbedaan merupakan anugerah  
Yang diberikan Tuhan kepada kita  
Karenanya terimalah anugerah itu  
Untuk saling menghargai/menghormati
4. Jika tidak saling menghargai/menghormati  
Sikap saling menghina akan muncul, maka kehidupan akan kacau  
Begitu juga sikap saling bermusuhan maka yang terjadi adalah pertengkaran dan tindakan anarkis  
Oleh karena itu, hiduplah bertoleransi  
Agar hidup rukun dan damai dapat terwujud

5. Untuk melakukan toleransi, maka ada **Prinsip 5 S** yang dapat dipedomani dalam melakukan komunikasi:
  - a. Saling senyum;
  - b. Saling sapa/tegur;
  - c. Saling mengenal;
  - d. Saling menghargai/menghormati (Timbul Empati);
  - e. Saling kerjasama (Gotong Royong) untuk memperoleh manfaat bersama.
  
6. Sikap toleransi harus dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia Khususnya masyarakat dan generasi muda (pelajar, mahasiswa dan pemuda).

Khusus para pemuka agama dan tokoh masyarakat dapat meningkatkan komunikasi pada tingkat pimpinan maupun akar rumput (grassroot).

Agar tumbuh sikap saling menghargai/menghormati dan toleransi, demi terciptanya hidup yang rukun dan damai, serta Terjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam wadah NKRI.

**Jayalah Negeriku dan Jayalah Indonesia.**

**Jakarta, Januari 2016.**



